



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa permasalahan demografi penduduk apabila tidak ditangani secara baik, terintegrasi dan menyeluruh oleh seluruh perangkat daerah akan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk dan ketidakseimbangan persebaran penduduk sebagai akibat dinamika kelahiran, kematian dan migrasi, sehingga diperlukan perencanaan pembangunan kependudukan;
- b. bahwa peta jalan pembangunan kependudukan nasional merupakan arah kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, perlu ditetapkan kebijakan pembangunan kependudukan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025- 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat PJPk adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan Daerah tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
5. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.

8. Penduduk adalah warga Daerah dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Daerah.
9. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
10. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
13. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
14. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan Penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
15. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan Penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Pasal 2

PJPK dimaksudkan untuk memberikan pedoman terhadap arah Pembangunan Kependudukan di Daerah agar terarah, efektif, efisien, terukur serta memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan PJPK ini:

- a. mewujudkan Kualitas Penduduk dalam aspek kesehatan, Pendidikan, sosial, dan budaya, sehingga mampu mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan;
- b. mewujudkan Kuantitas Penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan Kependudukan dan lingkungan;
- d. mewujudkan kesejahteraan Penduduk melalui penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja;

- e. mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah pengembangan dengan wilayah perdesaan menjadi suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mampu menarik gerak keruangan Penduduk yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau;
- f. mewujudkan pengarahannya Mobilitas Penduduk secara merata antar wilayah;
- g. mewujudkan Keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan Gender serta mampu merencanakan sumber daya Keluarga;
- h. mewujudkan bonus demografi yang optimal melalui pengendalian Kuantitas Penduduk dan peningkatan Kualitas Penduduk;
- i. mewujudkan data dan informasi Kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data Kependudukan; dan
- j. menciptakan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dokumen PJPk.
- (2) PJPk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab i : pendahuluan;
 - b. bab ii : sasaran Pembangunan Kependudukan tahun 2025-2029;
 - c. bab iii : rencana aksi tahun 2025-2029; dan
 - d. bab iv : penutup.
- (3) Dokumen PJPk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) PJPk diselenggarakan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinasi PJPk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim koordinasi PJPk yang bersifat nonstruktural.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan PJPk.

- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kebijakan dan pelaksanaan PJPKNasional dan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melaksanakan tugas dibantu oleh kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bidang pengendalian Kuantitas Penduduk;
 - b. bidang peningkatan Kualitas Penduduk;
 - c. bidang pembangunan Keluarga;
 - d. bidang penataan persebaran dan pengaturan Mobilitas Penduduk; dan
 - e. bidang administrasi Kependudukan.

Pasal 8

Pendanaan PJPK tahun 2025-2029 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 10 April 2026

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 10 April 2026

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SURIANI A.

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN TAHUN 2026 NOMOR 02

PJPK TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika kependudukan Indonesia menunjukkan tantangan yang semakin kompleks. Pertumbuhan penduduk yang masih relatif tinggi, terbanyak keempat di dunia, persebaran penduduk yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta peningkatan proporsi usia produktif yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, menjadi persoalan strategis yang harus segera diatasi. Berdasarkan laporan *Human Capital Index (HCI)* Bank Dunia tahun 2020, skor Indonesia hanya 0,54, artinya seorang anak yang lahir di Indonesia saat ini diperkirakan hanya dapat mencapai 54 persen dari potensi produktivitasnya pada kondisi ideal. Angka ini jauh di bawah negara-negara lain di Asia.

Selain persoalan kualitas penduduk yang tidak seiring dengan kuantitas penduduk, Indonesia saat ini dalam sedang memasuki periode bonus demografi. Kondisi ini menjadi potensi dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun potensi bonus demografi dan jumlah penduduk yang banyak hanya dapat dimanfaatkan secara optimal jika penduduk usia produktif mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan lapangan kerja yang memadai. Selain itu Indonesia sedang mengalami *aging population* yang ditandai dengan meningkatnya proporsi jumlah penduduk lansia. Peningkatan jumlah penduduk lansia akan menciptakan ketergantungan kepada penduduk usia produktif.

Pembangunan kependudukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan pembangunan di berbagai sektor. Oleh karena itu, pengelolaan kependudukan yang terencana, terpadu, dan berbasis data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin arah pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan penduduk, kualitas sumber daya manusia, serta daya dukung lingkungan dan ekonomi daerah.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki karakteristik wilayah yang unik, terdiri atas wilayah daratan, pesisir, dan kepulauan. Kondisi geografis ini berimplikasi pada ketimpangan persebaran penduduk dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta lapangan kerja. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di beberapa wilayah tertentu juga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap sumber daya alam dan pelayanan publik. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, jumlah penduduk tahun 2024 sebanyak 361.791¹ jiwa yang terdiri dari 183.935 perempuan dan 177.856 laki-laki.

¹ Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka Tahun 2025

Dari sisi kualitas penduduk, masih terdapat tantangan seperti angka stunting yang relatif tinggi, tingkat pendidikan yang belum merata, dan ketahanan keluarga yang belum optimal. Selain itu, isu sosial seperti perkawinan usia anak, kemiskinan, serta rendahnya partisipasi remaja dalam program pembangunan keluarga masih menjadi perhatian serius. Sementara di sisi lain, peluang bonus demografi yang tengah dihadapi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia agar lebih produktif dan berdaya saing. Untuk itu, perlu upaya yang sistematis dalam mengarahkan kebijakan dan program lintas sektor agar fokus pada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pemerataan persebaran penduduk, serta penguatan ketahanan keluarga.

Pembangunan kependudukan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Penduduk bukan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan juga subjek dan pelaku utama yang menentukan keberhasilan pembangunan Daerah. Oleh karena itu, penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) menjadi sangat penting sebagai upaya sistematis untuk mengarahkan pengelolaan kependudukan agar lebih terencana, terukur, dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah.

PJPK disusun sebagai penjabaran operasional dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tahun 2025 - 2050 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman strategis bagi Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan isu-isu kependudukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Melalui PJPK, setiap kebijakan dan program pembangunan daerah diharapkan dapat berbasis pada data dan dinamika kependudukan yang aktual.

Penyusunan PJPK menjadi penting karena memberikan arah yang jelas bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola lima dimensi utama kependudukan, yaitu: pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, serta penataan administrasi data kependudukan. Dengan pengelolaan yang baik terhadap lima dimensi tersebut, daerah dapat mengoptimalkan potensi penduduk sebagai modal pembangunan sekaligus meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh ketidakseimbangan jumlah dan kualitas penduduk.

Selain itu, PJPK berperan penting dalam mempersiapkan daerah menghadapi dan memanfaatkan bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Melalui perencanaan kependudukan yang matang, daerah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan kerja sehingga mampu berkontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi.

PJPK juga menjadi instrumen koordinasi lintas sektor dan lintas perangkat daerah. Pembangunan kependudukan tidak dapat dilaksanakan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan adanya PJPK, seluruh pemangku kepentingan memiliki arah dan tujuan yang sama dalam

mengelola isu-isu kependudukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, PJPK memiliki nilai strategis sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan kependudukan daerah. Dokumen ini tidak hanya memastikan pembangunan yang responsif terhadap dinamika penduduk, tetapi juga menjamin bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan keluarga di daerah.

Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan tersebut. Peta jalan ini berfungsi sebagai dokumen arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan. Dokumen ini akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah, sehingga seluruh sektor pembangunan dapat berorientasi pada keseimbangan antara jumlah, persebaran, dan kualitas penduduk.

B. TUJUAN

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
Mengarahkan kebijakan pengendalian penduduk agar seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga pertumbuhan penduduk tidak menjadi beban pembangunan, tetapi menjadi kekuatan produktif yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas penduduk dan keluarga
Meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta memperkuat ketahanan dan karakter keluarga sebagai unit terkecil pembangunan sosial yang tangguh.
3. Mewujudkan struktur dan komposisi penduduk yang ideal
Menata keseimbangan antara penduduk usia muda, produktif, dan lanjut usia agar pembangunan daerah dapat memanfaatkan momentum *bonus demografi* secara optimal, sekaligus menyiapkan strategi menghadapi era penduduk menua.
4. Mengatur persebaran dan mobilitas penduduk yang proporsional
Mengarahkan persebaran penduduk sesuai potensi wilayah dan kapasitas infrastruktur daerah, serta mengelola arus migrasi dan mobilitas agar mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah.
5. Mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah
Menjadikan isu dan data kependudukan sebagai dasar dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta dalam perumusan kebijakan sektoral lintas perangkat daerah.
6. Memperkuat kelembagaan dan koordinasi lintas sektor
Meningkatkan sinergi antara Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, BKKBN, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketenagakerjaan, dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan kependudukan.

7. Mendorong pembangunan yang berpusat pada manusia (*people-centered development*)

Menjadikan penduduk sebagai subjek dan pelaku utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan, dengan menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

C. SASARAN

1. Terkendalinya Kuantitas Penduduk

Sasaran ini menekankan pada upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Fokus utamanya adalah:

- menurunkan angka kelahiran total (*total fertility rate / tfr*) menuju tingkat penggantian (*replacement level*);
- menekan laju pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan;
- meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga;
- menguatkan peran program keluarga berencana sebagai instrumen utama pengendalian penduduk; dan
- pengendalian kuantitas penduduk yang baik akan membantu Daerah menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan ketersediaan sumber daya alam dan infrastruktur.

2. Tersebarinya Penduduk Secara Proporsional dan Merata

Sasaran ini berorientasi pada penataan dan pengelolaan persebaran penduduk antarwilayah agar lebih seimbang dan efisien. Tujuannya adalah:

- mengurangi konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan dan pesisir tertentu;
- mendorong pembangunan wilayah tertinggal agar mampu menarik penduduk melalui lapangan kerja dan fasilitas dasar;
- menyusun kebijakan mobilitas penduduk yang mendukung keseimbangan pembangunan antarwilayah, terutama antara wilayah daratan dan kepulauan;
- mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah sesuai karakter geografis dan ekonomi Daerah; dan
- persebaran penduduk yang merata akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

3. Terciptanya Kualitas Penduduk yang Tinggi

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Upaya yang dilakukan meliputi:

- meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, termasuk penurunan angka kematian ibu dan bayi serta pencegahan stunting.
- meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi seluruh kelompok usia.
- meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja.

- memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai fondasi pembangunan manusia.
 - kualitas penduduk yang tinggi menjadi syarat utama bagi keberhasilan pembangunan dan peningkatan indeks pembangunan manusia di Daerah.
4. Terselenggaranya Mobilitas Penduduk yang Terkelola
- Sasaran ini menekankan pentingnya pengelolaan pergerakan penduduk, baik migrasi internal maupun eksternal, agar memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Tujuannya antara lain:
- menata arus migrasi masuk dan keluar agar tidak menimbulkan ketimpangan atau beban berlebih pada wilayah tertentu;
 - meningkatkan kapasitas daerah asal dan tujuan migrasi dalam penyediaan lapangan kerja, perumahan, dan layanan dasar;
 - menyusun kebijakan mobilitas yang mendukung pemerataan kesempatan kerja dan pembangunan ekonomi Daerah; dan
 - mobilitas penduduk yang terkelola dengan baik akan memperkuat konektivitas wilayah dan memperluas pemerataan hasil pembangunan.
5. Tercapainya Pembangunan Keluarga yang Berkualitas
- Sasaran ini berorientasi pada penguatan keluarga sebagai unit terkecil dan utama dalam pembangunan sosial. Fokus utama pembangunan keluarga meliputi:
- meningkatkan ketahanan keluarga dari aspek ekonomi, sosial, psikologis, dan lingkungan;
 - mendorong keluarga agar memiliki perencanaan kehidupan yang baik, sehat, dan harmonis;
 - meningkatkan peran keluarga dalam pendidikan karakter dan pengasuhan anak; dan
 - mengurangi kerentanan sosial, kemiskinan, dan kekerasan berbasis keluarga.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Intervensi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2021-2045;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2029;

E. BATASAN PENGERTIAN

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
3. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengelolaan kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
4. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.

5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
10. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
11. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
12. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
13. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
14. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
15. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
16. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
17. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan adalah dokumen operasionalisasi GDPK selama 5 tahun yang memuat analisis situasi kependudukan, kebijakan dan strategi, sasaran, indikator, target per tahun, dan rencana aksi untuk mencapai target pembangunan kependudukan.
18. Rencana Aksi adalah langkah-langkah dan kegiatan operasional yang rinci untuk mencapai tujuan tertentu termasuk sasaran, indikator, program, kegiatan dan penanggung jawab.

19. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
20. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

F. ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025, jumlah penduduk pada tahun 2024 mencapai 361.791 jiwa², dengan komposisi penduduk laki-laki sekitar 177.856 jiwa (49%) dan perempuan 183.935 jiwa (51%). Komposisi penduduk menunjukkan dominasi kelompok usia produktif (15–64 tahun) sekitar 67.25%, sedangkan kelompok usia muda (0–14 tahun) sekitar 25.75%, dan lansia (65 tahun ke atas) 7%. Kondisi ini menggambarkan bahwa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sedang berada pada fase bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan nonproduktif.

Mengacu pada laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020-2024 berkisar 1,09%-1,37% setiap tahunnya, maka jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diproyeksikan akan terus meningkat dalam lima tahun ke depan sebagaimana tergambarkan pada gambar berikut:



Dengan demikian, jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diproyeksikan mencapai sekitar 380.664 jiwa pada tahun 2029, meningkat sekitar 23 ribu jiwa dibandingkan tahun 2024.

² RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2025-2029

Kenaikan jumlah penduduk dalam lima tahun ke depan akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar dan pembangunan di berbagai sektor, antara lain:

- Sektor Pendidikan: meningkatnya jumlah anak usia sekolah memerlukan penambahan ruang kelas, tenaga pendidik, dan fasilitas pendidikan di setiap jenjang.
- Sektor Kesehatan: meningkatnya penduduk usia produktif dan lansia menuntut penguatan layanan kesehatan dasar, kesehatan reproduksi, serta pelayanan gizi dan stunting.
- Sektor Ketenagakerjaan: pertambahan penduduk usia kerja menuntut penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat.

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan kependudukan daerah perlu diarahkan pada pengelolaan pertumbuhan penduduk yang seimbang, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan antarwilayah kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BERDASARKAN 30 INDIKATOR

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
1	Total Fertility Rate (TFR)	- Akses kontrasepsi modern masih terbatas di daerah pesisir dan kepulauan - Pendidikan rendah dan keluarga miskin serta ketersediaan lapangan kerja yang rendah meningkatkan peluang perkawinan anak. - Perempuan tidak memiliki kontrol dalam pengambilan keputusan kesehatan reproduksi.	- Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kasus Perkawinan Anak (dispensasi) tahun 2024 sebanyak 15 kasus, turun 345% (52 kasus). Sementara Data Kehamilan di bawah umur 18 tahun sebanyak 138 kehamilan - Perempuan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (2,14) masih melahirkan lebih banyak anak dibanding rata-rata perempuan Indonesia (2,11).	- Program Penduduk Pengendalian - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	- Dampak Demografis - Pertumbuhan penduduk stabil, menuju piramida umur yang seimbang. - Pencapaian bonus demografi optimal, proporsi usia produktif dominan. - Transisi demografi berlangsung sehat: penduduk tidak melonjak, tidak menyusut terlalu cepat. - Dampak Ekonomi - Peningkatan produktivitas tenaga kerja karena investasi keluarga meningkat pada pendidikan dan kesehatan anak.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
					◦ Daerah lebih mudah melakukan perencanaan tata ruang, sekolah, fasilitas kesehatan. ◦ Beban fiskal berkurang karena kebutuhan layanan anak menurun secara proporsional. • Dampak Sosial ◦ Kesejahteraan keluarga meningkat. ◦ Perempuan memiliki kesempatan lebih besar untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, berperan dalam pengambilan keputusan keluarga. ◦ Stunting dan kematian ibu/bayi menurun karena <i>spacing</i> antar kelahiran lebih baik.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
2	Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	• Norma sosial yang masih mentolerir atau mendorong perkawinan usia anak. • Praktik perijodohan, tekanan keluarga untuk menikah usia anak. • Anggapan bahwa perempuan tanpa perkawinan dianggap belum “dewasa”. • Kemiskinan mendorong keluarga menikahkan anak demi mengurangi beban ekonomi. • Rendahnya literasi kesehatan reproduksi di kalangan remaja.	• ASFR 15-19 sebesar 26,8 menunjukkan: ◦ Literasi dan pemahaman kesehatan reproduksi remaja masih rendah. ◦ Akses dan pemanfaatan layanan kesehatan ramah remaja belum optimal. ◦ Penguatan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat belum merata.	• Program Penduduk Pengendalian Cakupan Kabupaten/Kota • Pengendalian Perkiraan Penduduk Daerah	• Dampak kesehatan ◦ Meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, kematian ibu remaja, dan kematian bayi. ◦ Bayi lebih berisiko lahir prematur, BBLR, dan mengalami stunting. • Dampak pendidikan ◦ Anak/Remaja yang hamil cenderung putus sekolah, menghambat mobilitas sosial dan karir sehingga berkurangnya kualitas SDM generasi mendatang. • Dampak Ekonomi ◦ Meningkatkan TFR karena kehamilan terjadi lebih dini.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
					- o Menghambat tercapainya bonus demografi optimal. • Dampak Kependudukan - o Meningkatkan dependency ratio (rasio ketergantungan). - o Menambah risiko KDRT dan eksploitasi anak. - o Meningkatkan dependency ratio (rasio ketergantungan). • Dampak Sosial - o Menambah risiko KDRT dan eksploitasi anak. - o Meningkatkan masalah kesejahteraan anak dan keluarga muda.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
3	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	• Norma budaya yang menolak KB tertentu. • Keputusan penggunaan KB didominasi suami atau mertua. • Stigma bahwa KB menyebabkan infertilitas atau efek samping berbahaya • Kemiskinan yang membatasi akses transportasi ke fasilitas kesehatan. • Ketergantungan pada layanan gratis namun stok sering tidak tersedia. • Puskesmas atau faskes jauh, terutama di daerah kepulauan. • Stok alat kontrasepsi tidak merata (IUD/Implan sering kosong).	• Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi masih belum optimal, sehingga risiko kehamilan tidak diinginkan tinggi, TFR sulit turun, dan pelayanan KB perlu diperkuat secara menyeluruh. • Akses dan kualitas pelayanan KB belum merata terutama daerah pegunungan dan kepulauan. • Pemanfaatan metode kontrasepsi modern masih terbatas. • Pengetahuan dan kesadaran PUS terhadap perencanaan keluarga belum optimal.	• Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan Pengendalian Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	• Dampak Kesehatan, seperti: ◦ Kehamilan tidak diinginkan meningkat. ◦ Risiko BBLR, anemia, dan komplikasi meningkat. ◦ Tingginya angka kehamilan remaja. • Dampak kependudukan, seperti: ◦ TFR tetap tinggi atau stagnan. ◦ Pertumbuhan penduduk lebih cepat. ◦ Ketidakseimbangan struktur umur. • Dampak sosial ekonomi, seperti: ◦ Beban ekonomi keluarga bertambah.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		• Minimnya kesehatan terlatih untuk metode jangka panjang. • Remaja, calon pengantin, dan PUS baru kurang terpapar informasi.			◦ Angka putus sekolah pada remaja meningkat. ◦ Siklus kemiskinan antar generasi semakin kuat

2. Peningkatan Kualitas Penduduk

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
4	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	• Akses pendidikan terbatas terutama daerah pesisir dan kepulauan • Keterbatasan ekonomi keluarga, sehingga anak memilih bekerja. • Perkawinan anak, menyebabkan putus sekolah khususnya bagi remaja perempuan.	• Tingkat pendidikan penduduk dewasa masih setara SMP kelas 2 (Nilai 8,47) • Kualitas SDM masih rendah karena sebagian besar belum mendapatkan pendidikan menengah atas yang umumnya	• Program Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar • Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama • Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) • Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Keselaraan • Program Pengembangan Kurikulum	• Jika RLS meningkat: ◦ Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. ◦ Penurunan tingkat kemiskinan struktural. ◦ Penurunan fertilitas (semakin tinggi tingkat pendidikan maka TFR akan menurun). ◦ Penguatan ketahanan keluarga.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		- Rendahnya literasi orang tua dan minat pendidikan. - Pekerjaan sektor informal yang tidak menuntut pendidikan tinggi. - Kualitas sekolah yang belum merata antar wilayah. - Perpindahan penduduk (urbanisasi) yang menyebabkan putus sekolah.	diperlukan untuk pekerjaan dengan skill lebih tinggi.	- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Program Pengembangan Bahasa dan Sastra - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). - Meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah. - Jika RLS tetap rendah: - Penduduk sulit bersaing di pasar kerja modern. - Produktivitas dan pendapatan rendah. - Kemiskinan dapat menjadi siklus turun-temurun. - Risiko perkawinan anak dan kelahiran remaja meningkat. - Lambatnya peningkatan kualitas SDM daerah. - Jika APK PT meningkat: - Peningkatan kualitas tenaga kerja (skilled labor).
5	Angka Partisipasi Kasar	Biaya pendidikan tinggi mahal (UKT, biaya hidup, transport).	Akses penduduk usia pendidikan ke jenjang pendidikan	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	- Jika APK PT meningkat: - Peningkatan kualitas tenaga kerja (skilled labor).

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
	Pendidikan Tinggi	• Kemiskinan keluarga, sehingga anak memilih bekerja. • Kurangnya informasi beasiswa • Kualitas dan kesiapan SMA/SMK tidak merata. • Norma sosial yang mendorong remaja cepat bekerja/menikah.	• tinggi masih terbatas (91,35%). • Masih ada kesenjangan partisipasi pendidikan tinggi antar wilayah dan kelompok sosial ekonomi. • Minimnya kesadaran pentingnya pendidikan tinggi bagi peningkatan kualitas SDM.		◦ Produktivitas ekonomi meningkat. ◦ Penurunan angka kemiskinan jangka panjang. ◦ Kualitas ketahanan keluarga membaik. ◦ Daerah lebih menarik bagi investasi karena SDM lebih kompetitif. ◦ Mendukung bonus demografi untuk menjadi dividen demografi. • Jika APK PT tetap rendah: ◦ Tenaga kerja didominasi pendidikan rendah (produktivitas stagnan). ◦ Gaji dan kesempatan kerja berkualitas rendah bagi pemuda. ◦ Daya saing daerah tertinggal.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
6	Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi kompetensi kerja (Persentase penduduk bersertifikat keahlian)	- Biaya sertifikasi tinggi (ujian, pelatihan, asesor, LSP). - Kurangnya LSP/TPK (Tempat Uji Kompetensi) di wilayah. - Minimnya informasi tentang manfaat sertifikasi. - Banyak pekerja sektor informal belum tersentuh pelatihan vokasi. - Perusahaan kecil/UMKM tidak mewajibkan sertifikat kompetensi. - Keterbatasan fasilitas BLK/LPK sebagai	- Tenaga kerja daerah hampir seluruhnya ($\pm 98\%$) belum tersertifikasi. Sementara yang tersertifikasi hanya 2,16%. - Proporsi tenaga kerja bersertifikat sangat rendah Angka 2,16% menunjukkan bahwa hanya sekitar 2 dari 100 tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi resmi. Ini mengindikasikan rendahnya pengakuan formal terhadap	- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	- Jika persentase sertifikasi meningkat: - Produktivitas tenaga kerja meningkat. - Tenaga kerja lebih mudah masuk sektor industri formal. - Daerah menjadi lebih kompetitif untuk investasi. - Upah rata-rata meningkat seiring kompetensi yang terstandar. - Mengurangi pengangguran terbuka dan setengah menganggur. - Menguatkan kesiapan menghadapi

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		• penyelenggara pelatihan. • Sistem ketenagakerjaan lokal yang belum berbasis kompetensi.	keterampilan pekerja. • Mayoritas tenaga kerja masih mengandalkan pengalaman, bukan standar kompetensi. Keterampilan pekerja belum diverifikasi melalui uji kompetensi, sehingga sulit memastikan mutu dan profesionalisme secara objektif.		transformasi ekonomi & teknologi. • Jika tetap rendah (seperti 2,16%): ◦ Kualitas tenaga kerja stagnan → daya saing lemah. ◦ Perusahaan sulit memenuhi standar industri nasional/internasional. ◦ Risiko tertinggal dalam pasar kerja berbasis skill. ◦ Meningkatnya pengangguran struktural karena mismatch keahlian. ◦ Bonus demografi tidak optimal → bisa berubah menjadi beban demografi.
7	Prevalensi Stunting (pendek dan	• Gizi Ibu dan Kehamilan ◦ Ibu hamil kekurangan	• Angka 9,32% (rendah) menunjukkan bahwa angka stunting	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	• Jika stunting berhasil diturunkan: ◦ Kualitas SDM meningkat signifikan.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
	sangat pendek) pada balita	- asupan gizi dan zat besi. - o Kehamilan remaja atau jarak kelahiran terlalu dekat. • Pola Asuh dan Gizi Balita - o Pemberian ASI eksklusif kurang optimal. - o MP-ASI tidak sesuai umur dan bergizi rendah. • Kesehatan & Lingkungan - o Penyakit infeksi berulang (diare, ISPA). - o Sanitasi buruk, akses air bersih terbatas. • Sosial & Ekonomi - o Keterbatasan pangan bergizi.	- terkendali dengan baik sesuai standar WHO. • Angka stunting sebesar 9,32%, menunjukkan 100 anak balita, sekitar 9 hingga 10 anak mengalami stunting (gangguan pertumbuhan kronis karena kekurangan gizi menahun • Terdapat ketimpangan wilayah: pesisir dan kepulauan lebih tinggi dibanding daratan.	• Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- o Risiko penyakit kronis di masa dewasa menurun. - o Produktivitas kerja generasi mendatang meningkat. - o Penurunan kemiskinan jangka panjang. - o Mendukung keberhasilan transformasi SDM dan bonus demografi. • Jika stunting tetap tinggi ($\geq 25\%$): - o Generasi muda berisiko memiliki kemampuan kognitif lebih rendah. - o Produktivitas ekonomi masa depan melemah. - o Biaya kesehatan meningkat. - o Daerah kehilangan potensi bonus demografi.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		o Rendahnya literasi gizi orang tua.			o Kemiskinan menjadi siklus turun-temurun.
8	Angka Kematian Balita (AKB)	• Kesehatan Ibu dan Kehamilan - o Gizi ibu kurang, anemia, kehamilan remaja atau kehamilan berisiko. - o Komplikasi kehamilan (preeklampsia, perdarahan, infeksi). • Persalinan dan Layanan Kesehatan - o Persalinan tidak melalui tenaga kesehatan terlatih. - o Akses fasilitas kesehatan terbatas (desa terpencil, biaya transport).	• Kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan ibu dan bayi belum merata. • Deteksi dini dan penanganan kehamilan serta persalinan berisiko masih perlu diperkuat. • Faktor gizi ibu, sanitasi, dan perilaku hidup bersih dan sehat masih berpengaruh.	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota • Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	• Jika AKB rendah (0,75) - o Bayi lebih banyak yang bertahan hidup sehingga kualitas SDM akan meningkat. - o Cakupan bonus demografi lebih optimal. - o Keluarga lebih sejahtera, biaya kesehatan menurun. - o Menunjukkan keberhasilan sistem kesehatan ibu dan anak. • Jika AKB meningkat - o Risiko kematian bayi tinggi sehingga kualitas SDM masa depan akan menurun. - o Produktivitas ekonomi generasi mendatang terhambat.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		- Gizi Perawatan Bayi - ASI eksklusif tidak diberikan. - Nutrisi bayi kurang. - Penyakit infeksi pada bayi (diare, ISPA, malaria). - Lingkungan dan Sosial - Sanitasi dan air bersih buruk, infeksi meningkat. - Keterbatasan akses layanan kesehatan. - Kurangnya pengetahuan orang tua tentang perawatan bayi.			- Biaya kesehatan meningkat. - Potensi bonus demografi tidak optimal.
9	Angka Kematian Ibu (AKI)	- Kesehatan Ibu dan Kehamilan - Gizi ibu kurang akan menyakibatkan anemia,	Tingkat kematian bayi cukup rendah, hal ini menunjukkan pembinaan	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	- Jika AKI tetap rendah (0,95) - Kesehatan ibu terjaga sehingga kualitas SDM generasi berikutnya lebih baik.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		- kekurangan zat besi. - Kehamilan remaja (<20 tahun) atau usia tua (>35 tahun). - Komplikasi kehamilan (preeklampsia, perdarahan, infeksi). - Penyakit penyerta ibu (hipertensi, diabetes, penyakit kronis). - Persalinan & Layanan Kesehatan - Persalinan di fasilitas terbatas atau tidak melalui tenaga kesehatan terlatih. - Jarak atau transportasi ke rumah sakit rujukan jauh.	- kesehatan ibu dan bayi berjalan baik. - AKI (5) menunjukkan tingkat kematian ibu rendah, namun masih ada ibu yang meninggal akibat komplikasi kehamilan atau persalinan. - Masih ada potensi risiko di daerah pesisir dan kepulauan (ibu dengan kehamilan berisiko, dan kelompok miskin)	- UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Keluarga lebih sejahtera, biaya kesehatan ibu rendah. - Mendukung bonus demografi melalui ibu sehat dan bayi sehat. - Jika AKI meningkat - Risiko kematian ibu meningkat, berdampak pada bayi baru lahir dan keluarga. - Produktivitas keluarga menurun. - Biaya kesehatan meningkat. - Ketahanan keluarga dan kualitas SDM menurun.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		◦ Minimnya fasilitas emergensi obstetri (operasi caesar, transfusi darah). • Sosial dan Lingkungan ◦ Kemiskinan menyebabkan keterbatasan akses layanan kesehatan. ◦ Rendahnya literasi kesehatan ibu sehingga terlambat mencari pertolongan. ◦ Norma sosial yang membatasi mobilitas ibu hamil. • Faktor Sistemik ◦ Kekurangan tenaga kesehatan terlatih di wilayah kepulauan. ◦ Keterbatasan pemantauan			

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		kehamilan berisiko tinggi.			
10	Tingkat Kemiskinan	• Keterbatasan lapangan kerja atau kesempatan usaha bagi kelompok rentan. • Ketergantungan pada sektor informal yang tidak stabil. • Fluktuasi harga kebutuhan pokok dan inflasi. • Rendahnya Pendidikan, keterampilan kerja terbatas. • Minimnya akses pelatihan vokasi atau sertifikasi kompetensi. • Biaya kesehatan tinggi, berpotensi menurunkan kesejahteraan. • Keluarga rentan menghadapi risiko	• Tingkat kemiskinan 12,41% masih relative tinggi, masih terdapat penduduk dengan keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar • Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja belum merata. • Produktivitas dan pendapatan rumah tangga masih rendah pada kelompok rentan. • Kerentanan ekonomi terhadap guncangan sosial dan ekonomi masih tinggi.	Terlampir	• Jika kemiskinan tetap rendah (0,97%) ◦ Kesejahteraan keluarga terjaga, kualitas SDM meningkat. ◦ Anak-anak sehat dan bersekolah, menurunkan risiko stunting. ◦ Produktivitas ekonomi daerah tinggi. ◦ Bonus demografi optimal, penduduk usia produktif lebih sejahtera. • Jika kemiskinan meningkat ◦ Risiko stunting, malnutrisi, dan putus sekolah meningkat. ◦ Beban sosial meningkat, biaya kesehatan, bantuan sosial naik.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		- stunting atau penyakit kronis. - Akses air bersih, listrik, dan transportasi terbatas. - Kurangnya bantuan sosial tepat sasaran. - Perlindungan sosial belum menjangkau semua kelompok rentan.			Produktivitas menurun, pertumbuhan ekonomi terhambat.
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita	- Sosial dan Budaya - Norma gender yang membatasi peran wanita di luar rumah. - Beban rumah tangga yang tinggi, mengurangi waktu bekerja. - Tekanan untuk menikah muda, mengurangi partisipasi kerja. - Ekonomi	- Dengan Wanita 58,16%, sebagian besar usia produktif terlibat dalam angkatan kerja, namun masih ada 42% yang belum bekerja atau tidak aktif mencari pekerjaan. - Banyak wanita bekerja di sektor informal atau paruh waktu.	- Program Penempatan Tenaga Kerja - Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	- Jika TPAK Wanita meningkat - Pendapatan keluarga meningkat sehingga menurunkan kemiskinan. - Pemberdayaan wanita meningkat, kesetaraan gender lebih baik. - Produktivitas ekonomi meningkat, pertumbuhan ekonomi daerah lebih tinggi.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		- o Keterbatasan lapangan kerja yang ramah gender. - o Biaya transportasi atau fasilitas pendukung kerja terbatas. • Pendidikan dan SDM - o Pendidikan atau keterampilan wanita terbatas sehingga akses pekerjaan terbatas. - o Kurangnya pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi untuk wanita. • Kesehatan - o Kesehatan reproduksi atau kurangnya fasilitas penitipan anak	• Kesenjangan upah dan posisi manajerial masih terlihat antara laki-laki dan perempuan.		- o Anak-anak lebih sejahtera karena ibu berpenghasilan. • Jika TPAK Wanita rendah - o Banyak potensi tenaga kerja tidak dimanfaatkan, produktivitas menurun. - o Ketersantungan keluarga pada satu sumber pendapatan, risiko kemiskinan lebih tinggi. - o Kesenjangan gender tetap besar. - o Bonus demografi tidak optimal, sebagian penduduk usia tidak produktif secara ekonomi.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		• membatasi partisipasi kerja. ◦ Sistem & Kebijakan ketenagakerjaan yang kurang mendukung fleksibilitas kerja wanita. ◦ Minimnya insentif perusahaan untuk pekerja wanita (misal cuti melahirkan, childcare).			
12	Persentase Pekerja Informal	• Ekonomi ◦ Lapangan kerja formal terbatas sehingga masyarakat memilih pekerjaan informal. ◦ Upah kerja formal rendah atau tidak merata, pekerja	• Nilai 54,38% menunjukkan bahwa dominasi pekerjaan dengan jaminan kerja terbatas • Keterbatasan kesempatan kerja sektor formal.	• Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja • Pelaksanaan Pelatihan berdasarakan Kompetensi Unit	• Jika persentase pekerja informal tinggi ◦ Pendapatan pekerja rendah dan tidak stabil ◦ Minim perlindungan sosial, rentan terhadap risiko kesehatan dan kecelakaan kerja. ◦ Produktivitas ekonomi Daerah terbatas.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		- lebih suka usaha mandiri. - Kenaikan biaya hidup dan inflasi, masyarakat mencari pekerjaan cepat tanpa kontrak formal. - Pendidikan dan Keterampilan - Pendidikan rendah, sulit bersaing di pekerjaan formal. - Minimnya keterampilan atau sertifikasi kompetensi. - Sosial dan Budaya - Norma atau tradisi usaha keluarga, generasi baru ikut usaha informal. - Kebutuhan fleksibilitas waktu (misal ibu rumah	- Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja masih beragam. - Akses pekerja informal terhadap jaminan sosial dan perlindungan ketenagakerjaan masih rendah.		- Pemerintah daerah perlu anggaran lebih untuk program bantuan sosial. - Jika persentase pekerja informal menurun (lebih banyak formal) - Pendapatan lebih stabil, kesejahteraan meningkat. - Pekerja memiliki akses jaminan sosial dan kesehatan. - Produktivitas ekonomi meningkat, pertumbuhan ekonomi daerah lebih sehat.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		• <i>Pressure</i> (Tekanan) tangga), memilih pekerjaan informal. • Sistem dan Regulasi ◦ Kurangnya akses pembiayaan dan modal untuk usaha formal. ◦ Perlindungan sosial (BPJS, jaminan kerja) belum menjangkau pekerja informal.			
13	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	• Sosial dan Budaya ◦ Stigma atau diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. ◦ Persepsi bahwa penyandang disabilitas "tidak produktif". • Pendidikan dan Keterampilan	• Persentase pekerja disabilitas di sektor formal rendah (2,80%), menunjukkan mayoritas penyandang disabilitas bekerja di sektor informal atau tidak bekerja.	• Program Penempatan Tenaga Kerja • Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	• Jika persentase meningkat ◦ Penyandang disabilitas lebih produktif, kontribusi terhadap ekonomi meningkat. ◦ Inklusivitas dan kesetaraan sosial membaik. ◦ Kesejahteraan keluarga penyandang disabilitas meningkat.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		- o Akses pendidikan terbatas, keterampilan formal kurang. - o Minim pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi yang inklusif. • Akses dan Infrastruktur - o Fasilitas publik dan tempat kerja kurang ramah disabilitas (aksesibilitas rendah). - o Transportasi publik tidak mendukung mobilitas penyandang disabilitas. • Sistem dan Kebijakan - o Kebijakan ketenagakerjaan	• Akses terhadap pekerjaan formal masih terbatas • Banyak penyandang disabilitas memiliki keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja formal. • Infrastruktur dan fasilitas kerja belum sepenuhnya ramah disabilitas.		- o Pencapaian SDGs terkait pekerjaan layak dan kesetaraan gender/disabilitas lebih optimal. • Jika persentase tetap rendah - o Penyandang disabilitas tetap marginal, produktivitas rendah. - o Banyak bekerja di sektor informal tanpa jaminan sosial, rentan kemiskinan. - o Kesenjangan sosial tetap tinggi, ketimpangan akses ekonomi dan pendidikan.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		belum sepenuhnya memprioritaskan inklusi disabilitas. - o Perusahaan kurang insentif untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. • Ekonomi - o Lapangan kerja formal terbatas dan persaingan tinggi. - o Banyak pekerjaan formal membutuhkan mobilitas fisik atau kemampuan tertentu yang tidak dapat dipenuhi sebagian penyandang disabilitas.			

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
14	Gini Ratio	• Ekonomi ◦ Perbedaan akses terhadap lapangan kerja formal vs informal. ◦ Konsentrasi kepemilikan aset (tanah, modal, properti) pada kelompok kecil. ◦ Fluktuasi ekonomi menyebabkan kelompok miskin lebih rentan. • Pendidikan & SDM ◦ Pendidikan dan keterampilan tidak merata, peluang pekerjaan berbeda. ◦ Minimnya pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi. • Sosial & Politik	• Angka 0,317 menggambarkan bahwa masih terdapat ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat dan wilayah • Akses terhadap sumber penghidupan belum merata, terutama dalam pekerjaan layak, pendidikan, dan layanan dasar. • Pertumbuhan ekonomi belum inklusif, sehingga manfaat pembangunan belum dirasakan secara seimbang oleh seluruh lapisan masyarakat.	• Program Perencanaan Pembangunan Daerah • Pengendalian Ketimpangan Wilayah dan Sosial • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	• Jika Gini Ratio menurun (ketimpangan berkurang) ◦ Distribusi pendapatan lebih merata, kesejahteraan masyarakat meningkat. ◦ Kemiskinan menurun, akses layanan dasar lebih merata. ◦ Produktivitas ekonomi lebih inklusif, pertumbuhan berkelanjutan. ◦ Konflik sosial dan ketidakpuasan masyarakat menurun. • Jika Gini Ratio tetap tinggi ◦ Ketimpangan tetap tajam, kelompok miskin sulit naik kelas ekonomi. ◦ Risiko sosial dan kemiskinan struktural tinggi.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		- o Diskriminasi gender atau kelompok minoritas, akses ekonomi terbatas. - o Kebijakan ekonomi yang belum inklusif, keuntungan ekonomi terkonsentrasi. • Sistem dan Kebijakan - o Keterbatasan program redistribusi atau bantuan sosial. - o Pajak progresif dan subsidi belum optimal.			- o Produktivitas tidak merata, pertumbuhan ekonomi terbatas. - o Bonus demografi tidak optimal, sebagian penduduk usia produktif tidak produktif secara ekonomi.
15	PDRB Perkapita	• Ekonomi - o Ketergantungan pada sektor tertentu (misal migas, industri, atau jasa), risiko fluktuasi.	• PDRB per kapita 96,36 juta, menunjukkan rata-rata penduduk cukup sejahtera. • Konsumsi dan daya beli masyarakat	• Program Perencanaan Pembangunan Daerah • Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Daerah	• Jika PDRB per kapita tinggi (96,36 juta) tetap terjaga - o Kesejahteraan masyarakat tinggi sehingga gizi,

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		- o Ketimpangan distribusi PDRB, sebagian kecil masyarakat menguasai pendapatan tinggi. • Penduduk dan SDM - o Pertumbuhan penduduk tinggi, PDRB per kapita bisa stagnan jika ekonomi tidak berkembang. - o Kualitas SDM belum merata, produktivitas pekerja rendah di beberapa sektor. • Sosial dan Infrastruktur - o Akses pendidikan, kesehatan, dan transportasi masih tidak merata, menghambat produktivitas	- tinggi, investasi di sektor lokal meningkat. • Produktivitas tenaga kerja relatif baik, namun ketimpangan pendapatan mungkin masih ada.		pendidikan, dan kesehatan meningkat. - o Produktivitas meningkat, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. - o Bonus demografi lebih optimal karena penduduk usia produktif lebih sejahtera. • Jika PDRB per kapita menurun - o Daya beli masyarakat menurun, kemiskinan risiko meningkat. - o Produktivitas ekonomi menurun, investasi berkurang. - o Ketimpangan sosial bisa meningkat, konflik ekonomi/ketimpangan pendapatan.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		• sebagian masyarakat. ◦ Lingkungan dan Risiko Alam ◦ Bencana alam atau degradasi lingkungan dapat mengurangi produksi ekonomi.			
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	• Ekonomi ◦ Pertumbuhan ekonomi yang lambat menyebabkan penciptaan lapangan kerja terbatas. ◦ Ketidakseimbangan sektor industri dan jasa, kesempatan kerja tidak merata. ◦ Inflasi tinggi, daya beli dan kemampuan perusahaan	• Tingkat pengangguran terbuka (3,99%), menunjukkan sebagian angkatan kerja belum terserap di pasar kerja formal maupun informal. • Kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja. • Kesempatan kerja formal belum sepenuhnya mampu	• Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	• Jika TPT menurun ◦ Penduduk produktif terserap (pendapatan meningkat, kemiskinan menurun) ◦ Produktivitas ekonomi meningkat (pertumbuhan ekonomi berkelanjutan) ◦ Bonus demografi optimal (penduduk usia produktif lebih produktif secara ekonomi) • Jika TPT tinggi

No	Indikator	<i>Pressure</i> (Tekanan)	<i>State</i> (Kondisi Saat ini)	<i>Response</i> (Rencana Aksi)	<i>Impact</i> (Evaluasi Dampak)
		• menyerap tenaga kerja menurun. • Pendidikan dan SDM ◦ Pendidikan tidak sesuai kebutuhan pasar kerja (mismatch keterampilan) ◦ Minimnya pelatihan vokasi atau sertifikasi kompetensi. • Sosial dan Demografi ◦ Pertumbuhan penduduk usia produktif tinggi, persaingan kerja meningkat. ◦ Mobilitas tenaga kerja terbatas oleh transportasi atau kondisi geografis. • Sistem dan Kebijakan ◦ Kurangnya program penciptaan	• menyerap seluruh angkatan kerja. • Transisi lulusan pendidikan ke dunia kerja masih menghadapi kendala.		◦ Pendapatan rumah tangga rendah (risiko kemiskinan meningkat) ◦ Produktivitas ekonomi rendah (pertumbuhan ekonomi terhambat) ◦ Peningkatan potensi sosial negatif (frustasi, kriminalitas, migrasi tenaga kerja)

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
17	Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi (Persentase kepemilikan NPWP)	• Ekonomi ◦ Banyak pelaku usaha atau individu yang tidak wajib mendaftarkan NPWP karena usaha skala kecil atau informal. ◦ Ketidakpastian ekonomi, tidak mendaftarkan NPWP karena khawatir beban pajak. • Sosial dan Budaya ◦ Rendahnya kesadaran pajak masyarakat (tidak melapor atau mendaftarkan)	• Kepemilikan NPWP telah mencapai 100%, namun kepatuhan dan pemanfaatan NPWP perlu dijaga dan dioptimalkan khususnya sektor informal.	• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah • Pengelolaan Basis Data dan Potensi Pendapatan	• Jika persentase kepemilikan NPWP meningkat ◦ Penerimaan pajak meningkat, pendanaan pembangunan lebih stabil. ◦ Pemerintah dapat menyusun program fiskal dan subsidi lebih efektif. ◦ Keadilan fiskal meningkat, beban pajak lebih merata. • Jika persentase kepemilikan NPWP rendah ◦ Penerimaan pajak terbatas, pembiayaan pembangunan terganggu.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		- o Persepsi negatif terhadap pajak dan birokrasi (kepemilikan NPWP rendah) • Sistem & Regulasi - o Proses pendaftaran NPWP yang rumit atau kurang aksesibilitas. - o Minimnya sosialisasi atau edukasi pajak. • Teknologi & Infrastruktur - o Infrastruktur administrasi pajak belum merata, pelayanan NPWP belum mudah diakses di seluruh wilayah.			- o Banyak potensi pajak dari UMKM atau individu tidak terserap. - o Ketimpangan beban pajak terjadi, kelompok menengah ke atas menanggung lebih banyak.

3. Pembangunan Keluarga

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
18	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	- Sosial dan Demografi - Tingginya angka perceraian dan konflik rumah tangga. - Urbanisasi cepat, tekanan ekonomi dan adaptasi sosial keluarga. - Waktu pengasuhan berkurang karena kedua orang tua bekerja. - Ekonomi - Pendapatan rumah tangga tidak stabil. - Biaya hidup tinggi (pendidikan, kesehatan, hunian). - Ketimpangan akses layanan dasar antar wilayah. - Pengasuhan Anak	- Kualitas keluarga sedang (Skor 61,20), keluarga cukup sehat dan berpendidikan, tetapi masih ada kelompok keluarga rentan. - Keluarga produktif sebagian besar berada di perkotaan, sementara di pesisir dan kepulauan kualitas keluarga lebih rendah. - Masih terdapat masalah gizi anak, pendidikan orang tua, atau ketahanan sosial yang perlu diperbaiki.	- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) - Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	- Jika i-Bangga meningkat - Keluarga lebih sehat, berpendidikan, dan produktif (kualitas SDM meningkat) - Anak-anak tumbuh optimal, menurunkan stunting dan malnutrisi. - Kesejahteraan meningkat, pendapatan keluarga naik, kemiskinan turun. - Stabilitas sosial dan harmonisasi keluarga meningkat. - Jika i-Bangga stagnan atau menurun - Keluarga rentan tetap ada, anak-anak berisiko stunting, putus sekolah, atau kekerasan.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		- o Kurangnya literasi pengasuhan positif. - o Risiko kekerasan terhadap anak. - o <i>Screen time</i> berlebihan, pelemanan interaksi keluarga. • Ketangguhan Keluarga - o Bencana dan kondisi darurat (ekonomi, kesehatan). - o Minimnya kesiapsiagaan terhadap risiko sosial.			- o Pendapatan dan kualitas hidup keluarga menurun. - o Produktivitas SDM rendah, ekonomi daerah tidak optimal. - o Risiko sosial meningkat, konflik keluarga dan komunitas lebih tinggi.
19	Indeks Perlindungan Anak	• Sosial dan Keluarga - o Kekerasan dalam rumah tangga atau pengasuhan tidak optimal. - o Rendahnya kesadaran orang	• Skor 73,49%, perlindungan anak cukup baik, sebagian besar anak mendapatkan hak dasar mereka. • Masih terdapat anak rentan di	• Program Perlindungan Khusus Anak • Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	• Jika IPA meningkat - o Anak-anak tumbuh sehat, aman, dan berpendidikan (kualitas SDM meningkat) - o Penurunan stunting, putus sekolah, dan kekerasan pada anak.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		tua tentang hak anak. - o Keluarga miskin atau rentan (anak berisiko putus sekolah) • Pendidikan dan SDM - o Akses pendidikan tidak merata, anak tidak mendapatkan pendidikan layak. - o Kualitas pendidikan rendah, keterampilan dan pengetahuan anak kurang optimal. • Kesehatan dan Lingkungan - o Malnutrisi, stunting, penyakit menular pada anak masih ada. - o Lingkungan rawan bencana atau sanitasi buruk	pegunungan dan kepulauan atau keluarga miskin. • Anak-anak relatif aman dari kekerasan fisik dan eksploitasi, tetapi kasus masih terjadi sporadis. • Akses pendidikan, gizi, dan kesehatan cukup merata, tetapi kualitas bervariasi.	• Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Khusus Daerah	- o Keluarga lebih harmonis dan produktif (kesejahteraan meningkat) - o Masyarakat dan lingkungan lebih aman, pembangunan berkelanjutan lebih optimal. • Jika IPA stagnan atau menurun - o Anak rentan memiliki risiko putus sekolah, malnutrisi, dan kekerasan meningkat. - o Produktivitas SDM menurun, kualitas generasi berikutnya rendah. - o Ketidakadilan sosial dan ketimpangan meningkat (konflik sosial lebih tinggi)

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		(risiko meningkat) anak - Sistem dan Kebijakan - Perlindungan hukum anak kurang optimal atau belum dijalankan secara menyeluruh. - Minimnya program intervensi lintas sektor (kesehatan, pendidikan, sosial). - Ekonomi - Kemiskinan, anak bekerja atau putus sekolah. - Keluarga tidak mampu membiayai kebutuhan dasar anak.			
20	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau,	- Ekonomi - Pendapatan rumah tangga rendah, sulit membeli atau	Sekitar 53% rumah tangga memiliki hunian layak, tetapi 47% masih tinggal	- Program Pengembangan Perumahan - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban	- Jika akses hunian layak meningkat - Kesehatan keluarga membaik sehingga

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
	dan Berkelanjutan	membangun rumah layak. - o Kenaikan harga tanah dan material konstruksi, membatasi akses hunian. • Sosial dan Demografi - o Pertumbuhan penduduk meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan rumah. - o Urbanisasi, meningkatnya permintaan hunian di kota (harga naik) • Lingkungan dan Infrastruktur - o Keterbatasan lahan, hunian padat atau informal meningkat.	di rumah tidak layak atau informal. Kondisi ini dapat menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi dan sosial yang berdampak pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan. • Hampir sebagian besar rumah tangga belum memiliki hunian yang memenuhi standar kelayakan, baik dari aspek bangunan, kepadatan ruang, ventilasi, maupun utilitas dasar. • Hunian yang terjangkau masih	Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota • Program Kawasan Permukiman • Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha • Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh • Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	menurunkan penyakit terkait sanitasi atau kualitas rumah buruk. - o Kesejahteraan meningkat, pendapatan rumah tangga dapat dialokasikan ke pendidikan dan konsumsi lain. - o Lingkungan hidup lebih berkelanjutan, hunian ramah lingkungan dan aman dari risiko bencana. - o Ketahanan sosial meningkat, masyarakat lebih stabil dan produktif. • Jika akses hunian layak stagnan atau rendah - o Kesehatan dan keselamatan keluarga terancam, penyakit atau risiko bencana meningkat.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		- o Risiko bencana alam (banjir, gempa, longsor) mengancam keberlanjutan hunian. • Sistem dan Kebijakan - o Regulasi perumahan belum sepenuhnya mempermudah rumah terjangkau. - o Kurangnya dukungan pembiayaan perumahan bagi kelompok rentan.	terbatas, baik akses pembiayaan, perumahan bersubsidi, maupun ketersediaan lahan yang sesuai. • Kualitas hunian di sejumlah wilayah mungkin belum memenuhi prinsip keberlanjutan, seperti akses terhadap air bersih, energi, sanitasi, ruang aman, dan mitigasi risiko bencana.		- o Kesenjangan sosial dan ekonomi tetap tinggi. - o Produktivitas SDM menurun (kualitas hidup generasi mendatang berisiko) - o Urbanisasi dan permukiman informal meningkat, tekanan terhadap infrastruktur kota.
21	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	• Ekonomi - o Pendapatan rendah, sulit membangun fasilitas sanitasi layak. - o Biaya pembangunan	• Hanya 2,39% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, sisanya 97,61% belum memiliki fasilitas sanitasi layak dan aman.	• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	• Jika akses sanitasi aman meningkat - o Penyakit menular menurun, kesehatan anak dan keluarga meningkat. - o Stunting dan malnutrisi berkurang

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		infrastruktur sanitasi tinggi, terutama di daerah terpencil. - Sosial dan Budaya - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi aman. - Praktik buang air besar sembarangan masih terjadi di beberapa komunitas. - Lingkungan dan Infrastruktur - Kekurangan air bersih, sulit membangun sanitasi sehat. - Kepadatan permukiman dan lokasi rawan banjir,	Kondisi ini meningkatkan risiko penularan penyakit (diare, stunting, cacangan, malaria).		karena kebersihan meningkat. - Produktivitas keluarga meningkat biaya kesehatan menurun. - Lingkungan lebih bersih dan aman, mendukung pembangunan berkelanjutan. - Jika akses sanitasi aman tetap rendah - Penyakit menular tinggi, angka stunting dan mortalitas anak meningkat. - Beban biaya kesehatan keluarga dan pemerintah meningkat. - Lingkungan kumuh dan tidak sehat meningkatkan risiko bencana. - Produktivitas SDM menurun,

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		- risiko sanitasi buruk meningkat. - Sistem dan Kebijakan - Program sanitasi belum menjangkau seluruh rumah tangga. - Monitoring dan implementasi regulasi sanitasi rendah.			kesejahteraan keluarga dan ekonomi terganggu.
22	Indeks Lansia Berdaya	- Ekonomi - Pendapatan lansia rendah, bergantung pada keluarga atau bantuan sosial. - Kurangnya akses pekerjaan produktif atau usaha untuk lansia. - Kesehatan - Penyakit kronis, gangguan mobilitas, dan keterbatasan fisik	- Lansia berdaya berada pada posisi sedang (Skor 58) - Sebagian lansia mandiri, memiliki akses terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi. - Masih terdapat lansia rentan: miskin, sakit kronis, atau tidak produktif.	- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	- Jika Indeks Lansia Berdaya meningkat - Lansia lebih mandiri, mengurangi beban keluarga. - Partisipasi sosial dan ekonomi meningkat sehingga kualitas hidup lebih baik. - Kesehatan lansia terjaga, biaya kesehatan menurun. - Jika Indeks Lansia Berdaya rendah

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		sehingga mengurangi kemandirian. - o Akses terbatas ke fasilitas kesehatan khusus lansia. • Sosial dan Keluarga - o Isolasi sosial, menurunkan kesejahteraan psikologis. - o Keluarga tidak mendukung lansia secara optimal. • Sistem dan Kebijakan - o Program perlindungan lansia belum merata. - o Kurangnya dukungan fasilitas publik ramah lansia (transportasi, tempat umum, layanan).			- o Lansia rentan (risiko kemiskinan, penyakit, dan isolasi sosial meningkat) - o Beban keluarga meningkat, ketimpangan sosial meningkat. - o Produktivitas dan partisipasi lansia rendah (potensi SDM tidak optimal) - o Risiko kesehatan masyarakat meningkat sehingga beban pelayanan publik lebih tinggi.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
23	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	• Remaja lebih banyak terpapar risiko digital, pergaulan bebas, dan tekanan sosial (modernisasi). • Orang tua sibuk bekerja sehingga waktu pengasuhan berkurang. • Kurangnya pengetahuan orang tua terkait pengasuhan berbasis kebutuhan psikososial remaja. • Lingkungan sosial yang kurang mendukung (pergaulan negatif, kenakalan remaja)	• Dengan skor 84,6, pengasuhan keluarga terhadap remaja masuk kategori sangat baik. • Komunikasi antar anggota keluarga berjalan efektif. • Keluarga memberikan pengawasan, dukungan emosional, dan nilai-nilai positif. • Remaja cenderung memiliki perilaku adaptif dan hubungan yang harmonis dengan orang tua.	• Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) • Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga • Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	• Jika nilai tetap atau meningkat ◦ Risiko kenakalan remaja berkurang. ◦ Kesehatan mental remaja meningkat. ◦ Pencapaian pendidikan remaja lebih baik. ◦ Terbentuk karakter remaja yang positif dan mandiri. • Jika nilai menurun ◦ Relasi keluarga menjadi tidakg. ◦ Risiko perilaku berisiko pada remaja meningkat (narkoba, kekerasan, pernikahan dini, dsb). ◦ Stres keluarga meningkat dan berdampak pada keselarasan sosial di lingkungan.
24	Cakupan (Persentase)	• Masih ada kelompok marjinal/ komunitas di	• Cakupan 99,67% menunjukkan JKN	• Perlindungan dan Jaminan Sosial	• Jika cakupan tetap tinggi atau meningkat

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
	Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	daerah yang sulit dijangkau. • Mobilitas penduduk (urbanisasi, migrasi) menyebabkan data kepesertaan berubah cepat. • Kesadaran sebagian masyarakat untuk memperbarui status kepesertaan masih rendah. • Ketergantungan pada pendanaan pemerintah untuk PBI (Peserta Bantuan Iuran). • Tantangan administrasi kependudukan (NIK belum valid, data ganda).	telah mencapai hampir seluruh populasi. • Masyarakat pada umumnya telah memiliki akses pembiayaan kesehatan yang lebih aman secara finansial. • Risiko masyarakat tidak mendapat layanan karena alasan biaya semakin kecil.	• Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	◦ Semakin kecil risiko masyarakat jatuh miskin akibat biaya kesehatan (financial hardship). ◦ Akses layanan kesehatan dasar dan rujukan lebih terjamin. ◦ Peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. ◦ Efisiensi sistem kesehatan meningkat berkat perlindungan pembiayaan universal. • Jika cakupan menurun ◦ Masyarakat berisiko kembali menghadapi biaya kesehatan yang tidak terjangkau. ◦ Potensi peningkatan kemiskinan akibat pengeluaran medis. ◦ Beban kesehatan daerah meningkat.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
					o Kesenjangan akses layanan makin melebar.

4. Persebaran Dan Mobilitas Penduduk

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
25	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	• Kapasitas kelembagaan kampung masih rendah (SDM, manajemen, koordinasi). • Ketergantungan tinggi pada pendampingan pemerintah, kampung belum mampu mandiri operasional. • Keterbatasan pendanaan lokal (desa/kekurahan) untuk menunjang kegiatan Kampung KB.	• Dengan nilai 1,94%, tingkat kemandirian kampung KB masih sangat rendah. • Mayoritas Kampung KB masih berada pada tahap Dasar atau Berkembang, belum mencapai Mandiri. • Kegiatan keluarga berencana, kesehatan, ekonomi, dan pemberdayaan belum berjalan secara rutin dan	• Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) • Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kersertaan Ber-KB	• Jika persentase meningkat - o Kampung mampu beroperasi mandiri dengan program keluarga berkualitas berjalan berkelanjutan. - o Pemberdayaan keluarga meningkat sehingga akan berkontribusi pada penurunan stunting, peningkatan ekonomi keluarga, kualitas pendidikan, dan pengasuhan.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		• Partisipasi masyarakat tidak merata, masih terpusat pada pengurus atau kader tertentu. • Integrasi sektor (pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan anak) belum berjalan optimal. • Fasilitas dan data program belum lengkap atau tidak diperbarui.	• terstruktur dan berkelanjutan. • Kapasitas kader dan kelembagaan kampung memerlukan penguatan lanjutan.		◦ Terbentuk ekosistem pembangunan keluarga yang kuat dari akar (desa/kelurahan). ◦ Pengurangan beban pendampingan pemerintah. • Jika persentase tetap rendah atau menurun ◦ Ketergantungan kampung pada pemerintah tetap tinggi. ◦ Program keluarga berkualitas tidak berjalan maksimal. ◦ Dampak pembangunan keluarga di tingkat akar menjadi lambat. ◦ Kesenjangan kualitas antar desa/kampung semakin besar.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
26	Rate Net Recent Migrasi	- Kesenjangan ekonomi antar daerah, daerah dengan lapangan kerja terbatas menyebabkan migrasi keluar. - Urbanisasi tinggi akibat kota menawarkan pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas lebih baik. - Ketimpangan layanan dasar (kesehatan, pendidikan, transportasi) antar wilayah. - Perubahan penggunaan lahan atau pembangunan industri yang memicu perpindahan penduduk. - Bencana alam atau kondisi keamanan	- Rate Net Recent Migrasi bernilai negatif (-6,64), menunjukkan arus keluar penduduk lebih besar dibandingkan arus masuk. - Terbatasnya kesempatan kerja dan daya tarik ekonomi daerah. - Akses pendidikan lanjutan dan fasilitas pendukung belum optimal. - Migrasi didominasi oleh penduduk usia produktif.	- Program Pencatatan Sipil - Pelayanan Pencatatan Sipil	- Jika nilai migrasi positif stabil/meningkat: - Pertumbuhan ekonomi lokal bisa meningkat. - Struktur penduduk lebih produktif. - Risiko tekanan pada pemukiman, transportasi, dan layanan dasar meningkat. - Jika nilai migrasi negatif atau menurun: - Penurunan aktivitas ekonomi lokal. - Kekurangan tenaga kerja usia produktif. - Risiko penuaan penduduk meningkat. - Pembangunan daerah menjadi tidak optimal karena hilangnya potensi SDM.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		- Yang mendorong migrasi keluar. - Hunian tidak layak atau keterbatasan infrastruktur desa.			

5. Integrasi Data Kependudukan

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
27	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	- Masih ada kelompok kecil yang kesulitan akses layanan (komunitas adat, daerah sangat terpencil). - Kesadaran orang tua untuk mengurus akta saat bayi baru lahir tidak merata. - Keterbatasan jaringan internet atau sistem pada daerah tertentu.	Dengan 99,79%, cakupan kepemilikan akta kelahiran balita tergolong sangat tinggi dan mendekati <i>universal coverage</i>. Hal ini karena didukung oleh keberadaan dan kinerja Kordukcapil di tingkat desa dan kelurahan.	- Program Pencatatan Sipil - Pelayanan Pencatatan Sipil	- Jika angka tetap tinggi atau meningkat - Semua anak memiliki identitas hukum dan akses ke layanan publik (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial). - Data penduduk semakin akurat untuk perencanaan pembangunan. - Perlindungan anak meningkat karena

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		- Beberapa orang tua belum melengkapi dokumen kependudukan yang diperlukan (NIK ibu/ayah). - Mobilitas penduduk tinggi, perubahan status balita tidak segera terdata.	- Mayoritas orang tua telah memahami pentingnya administrasi dasar anak. - Integrasi layanan kelahiran di fasilitas kesehatan (faskes) dan Dinas Dukcapil sudah berjalan baik. - Risiko balita tidak tercatat dalam administrasi negara semakin kecil.		- setiap anak tercatat secara resmi. - Risiko stateless children (anak tanpa kewarganegaraan) sangat kecil. - Jika angka menurun - Sebagian balita dapat kehilangan akses layanan dasar. - Ketidakakuratan data kependudukan meningkat. - Risiko eksploitasi atau perlindungan anak menurun bagi mereka tanpa identitas legal. - Hambatan bagi anak untuk masuk sekolah, memperoleh BPJS, atau bantuan sosial.
28	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Cerai	Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akta cerai kadang masih rendah,	Dengan 100% cakupan, semua perceraian telah dicatat secara resmi	- Program Pencatatan Sipil - Pelayanan Pencatatan Sipil	- Jika cakupan tetap 100% - Perlindungan hukum bagi mantan pasangan

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		terutama pada kelompok tertentu. - Proses hukum perceraian di pengadilan bisa memakan biaya/waktu sehingga beberapa orang tidak menyelesaikannya secara resmi. - Mobilitas penduduk dan perubahan status perkawinan tidak selalu segera dilaporkan. - Masih ada persepsi sosial tentang stigma bercerai yang membuat sebagian pihak tidak mengurus dokumen.	dan pasangan memiliki akta cerai. Hal ini karena didukung oleh keberadaan dan kinerja Kordukcapil di tingkat desa dan kelurahan. - Administrasi kependudukan dan sistem peradilan berjalan sangat baik dan terintegrasi. - Tidak ada kasus perceraian yang tidak tercatat atau menggunakan prosedur informal.		dan anak-anak semakin kuat. - Semua update status perkawinan dalam KTP dan KK akurat. - Meminimalkan sengketa hukum terkait harta bersama, hak asuh, atau kewarganegaraan. - Kualitas data kependudukan semakin baik, mendukung kebijakan sosial dan keluarga. - Pengurangan kasus perceraian tidak tercatat (unregistered divorce) yang berisiko bagi perempuan dan anak. - Jika angka menurun - Muncul kembali perceraian tidak resmi yang berisiko hukum.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
29	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Nikah	- Masih terdapat risiko pernikahan tidak tercatat jika tidak ada pengawasan ketat (misalnya nikah siri). - Akses pencatatan nikah bisa menantang di daerah terpencil atau kepulauan. - Pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta nikah masih bervariasi. - Migrasi dan mobilitas tinggi bisa membuat status perkawinan terlambat diperbarui.	- Dengan cakupan, 100% semua pasangan telah memiliki akta nikah yang sah. Hal ini karena didukung oleh keberadaan dan kinerja Kordukcapil di tingkat desa dan kelurahan. - Administrasi pencatatan perkawinan berjalan sangat baik baik di KUA maupun Catatan Sipil.	- Program Pencatatan Sipil - Pelayanan Pencatatan Sipil - Program Pencatatan Nikah - Pelayanan Nikah di KUA/Penghulu - Pelayanan Isbat Nikah - Program Sosialisasi & Edukasi Pencatatan Nikah - Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (GAS Nikah)	- Jika cakupan tetap 100% - Perlindungan hukum bagi pasangan dan anak semakin kuat. - Hak atas harta bersama, warisan, dan administrasi keluarga menjadi jelas. - Mengurangi praktik pernikahan tidak tercatat yang berisiko bagi perempuan dan anak. - Data kependudukan akurat, mendukung perencanaan pembangunan,

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		• Faktor sosial budaya tertentu masih mempengaruhi proses pencatatan.	• Masih tingginya perkawinan tidak tercatat (nikah sirri)		• bantuan sosial, dan program keluarga. • Jika angka menurun ◦ Muncul kembali pernikahan tidak resmi (nikah sirri). ◦ Risiko perempuan dan anak tidak memiliki perlindungan hukum. ◦ Ketidaksesuaian data KK/KTP meningkat. ◦ Pengaruh negatif terhadap indikator perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga.
30	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kematian	• Kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan kematian tidak merata. • Akses layanan Dukcapil di Daerah terpencil masih bisa menjadi hambatan.	• Dengan 100% cakupan, semua kejadian kematian telah tercatat dan keluarga memperoleh dokumen resmi. Hal ini karena didukung oleh keberadaan	• Program Pencatatan Sipil • Pelayanan Pencatatan Sipil	• Jika cakupan tetap 100% ◦ Keakuratan statistik kematian meningkat sehingga mendukung analisis kesehatan (AKB, AKI, penyakit tidak menular). ◦ Hak waris dan administrasi keluarga

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
		• Mobilitas penduduk dan kematian di luar daerah bisa menyebabkan keterlambatan pencatatan. • Faktor budaya tertentu mengutamakan proses pemakaman cepat sehingga pelaporan administratif tertunda. • Keterbatasan jaringan atau sistem informasi terutama di wilayah kepulauan.	• dan kinerja Kordukcapil di tingkat desa dan kelurahan. • Data mortalitas akurat dan dapat digunakan untuk kebijakan kesehatan, sosial, dan pembangunan. • Proses pemutakhiran KK dan NIK berjalan baik dan real-time. • Tidak ada kasus ghost identity orang yang sudah meninggal masih aktif). • Sistem pencatatan kematian telah terintegrasi dengan fasilitas kesehatan		• lebih jelas dan mudah diproses. ◦ Pengurangan kasus penyalahgunaan identitas orang yang telah meninggal. ◦ Data dasar perencanaan pembangunan dan program perlindungan sosial menjadi lebih valid. • Jika angka menurun ◦ Data penduduk menjadi tidak akurat karena orang yang sudah meninggal masih terdata sebagai hidup. ◦ Berpotensi memunculkan masalah hukum terkait warisan, aset, dan kepesertaan jaminan sosial. ◦ Menghambat validasi data bantuan sosial.

No	Indikator	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi Saat ini)	Response (Rencana Aksi)	Impact (Evaluasi Dampak)
			dan layanan desa/kelurahan.		o Kualitas statistik kependudukan dan kesehatan menurun.

G. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

1) PILAR 1 – PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK

a) Isu Strategis Utama

Menjaga keberlanjutan pengendalian kuantitas penduduk melalui stabilisasi Total Fertility Rate (TFR) mendekati replacement level, percepatan penurunan kelahiran remaja, serta peningkatan pemenuhan kebutuhan Keluarga Berencana (KB) modern yang merata dan berkualitas, khususnya di wilayah kepulauan dan kelompok rentan.

b) Isu Strategis Turunan

1) Stabilisasi TFR yang Berkelanjutan dan Berkeadilan Antarwilayah

TFR Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang relatif stabil pada kisaran 2,11–2,24 menunjukkan keberhasilan awal pengendalian fertilitas. Namun, fluktuasi yang masih terjadi mengindikasikan adanya ketimpangan perilaku fertilitas antarwilayah dan kelompok sosial. Isu strategis yang dihadapi adalah menjaga TFR tetap berada pada tingkat penggantian penduduk secara berkelanjutan, sekaligus memastikan pemerataan hasil pengendalian fertilitas di seluruh wilayah, termasuk kawasan kepulauan dan daerah terpencil.

2) Penurunan Kelahiran Remaja yang Belum Optimal

Tren penurunan ASFR usia 15–19 tahun dari 25,5 menjadi 19,9 selama 2020–2024 merupakan capaian positif. Namun, angka tersebut masih tergolong cukup tinggi dan berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, seperti risiko kesehatan ibu dan anak, putus sekolah, serta kemiskinan antargenerasi. Isu strategisnya adalah mempercepat penurunan kelahiran remaja melalui penguatan pencegahan perkawinan usia anak, perluasan edukasi kesehatan reproduksi, dan penyediaan layanan ramah remaja yang inklusif dan berkelanjutan.

3) Pemenuhan Kebutuhan KB Modern yang Belum Optimal dan Belum Merata

Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi oleh metode modern meningkat secara bertahap hingga mendekati 60 persen pada tahun 2024. Meskipun menunjukkan kemajuan, capaian ini masih berada di bawah tingkat ideal untuk mendukung pengendalian fertilitas jangka panjang. Isu strategis yang muncul adalah keterbatasan jangkauan layanan KB modern, preferensi terhadap metode tradisional, serta hambatan budaya dan informasi, terutama di wilayah kepulauan dan kelompok dengan akses layanan kesehatan terbatas.

4) Ketimpangan Akses Layanan Kependudukan dan KB di Wilayah Kepulauan

Karakteristik geografis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menimbulkan tantangan tersendiri dalam penyediaan layanan KB, kesehatan reproduksi, dan pendampingan keluarga. Isu strategisnya adalah memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pengendalian penduduk yang setara antara wilayah daratan dan kepulauan, agar hasil pembangunan kependudukan tidak timpang secara spasial.

5) Keterpaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk dengan Pembangunan Kualitas Penduduk

Pengendalian kuantitas penduduk tidak dapat berdiri sendiri. Stabilitas TFR dan penurunan ASFR perlu diiringi dengan peningkatan kualitas keluarga dan sumber daya manusia. Isu strategis yang dihadapi adalah belum optimalnya integrasi kebijakan kependudukan dengan sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan perlindungan sosial dalam kerangka pembangunan jangka panjang menuju pemanfaatan bonus demografi.

Isu-isu strategis tersebut menegaskan bahwa fokus pengendalian kuantitas penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ke depan tidak hanya diarahkan pada penurunan angka fertilitas semata, tetapi pada penguatan keberlanjutan, pemerataan, dan kualitas intervensi kependudukan. Pendekatan ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan struktur penduduk yang seimbang, berkualitas, dan berdaya saing hingga tahun 2050.

2) PILAR 2 – PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK

a) Isu Strategis Utama

Belum optimalnya peningkatan kualitas penduduk secara merata dan berkelanjutan, ditandai dengan capaian pendidikan penduduk dewasa yang masih rendah, keterbatasan akses pendidikan tinggi dan sertifikasi kompetensi, fluktuasi kualitas kesehatan ibu dan anak, tingginya kerentanan ketenagakerjaan informal, serta belum sepenuhnya inklusifnya pertumbuhan ekonomi terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan penyandang disabilitas.

b) Isu Strategis Turunan

1) Kualitas Pendidikan Penduduk Dewasa yang Masih Terbatas

Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) usia 25 tahun ke atas menunjukkan kemajuan signifikan, namun capaian 8,47 tahun pada 2024 masih berada di bawah standar pendidikan menengah. Hal ini mengindikasikan masih besarnya proporsi penduduk dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan menengah, serta adanya ketimpangan capaian pendidikan antarwilayah dan kelompok sosial, terutama di wilayah kepulauan. Isu strategisnya adalah mempercepat peningkatan kualitas pendidikan penduduk

dewasa melalui pendidikan kesetaraan, pendidikan lanjutan, dan peningkatan keterampilan fungsional.

2) Partisipasi Pendidikan Tinggi yang Stagnan dan Belum Inklusif

APK Pendidikan Tinggi menunjukkan peningkatan awal, namun cenderung stagnan dan sedikit menurun pada dua tahun terakhir. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan akses, daya dukung ekonomi, serta relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan pasar kerja lokal. Isu strategis yang dihadapi adalah memperluas dan mengefektifkan akses pendidikan tinggi dan vokasi yang terjangkau, relevan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

3) Rendahnya Pengakuan Kompetensi dan Kualitas Tenaga Kerja

Meskipun persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi meningkat secara signifikan dalam dua tahun terakhir, capaian absolut masih sangat rendah (2,16% pada 2024). Hal ini menunjukkan lemahnya sistem pengembangan keterampilan dan sertifikasi yang terhubung dengan kebutuhan pasar kerja. Isu strategisnya adalah meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui perluasan pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi profesi, dan kolaborasi dengan dunia usaha.

4) Keberlanjutan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak yang Belum Stabil

Penurunan prevalensi stunting merupakan capaian sangat positif, namun fluktuasi angka kematian balita dan kematian ibu menunjukkan bahwa sistem layanan kesehatan ibu dan anak masih rentan. Isu strategisnya adalah memastikan keberlanjutan dan pemerataan layanan kesehatan ibu dan anak, penguatan sistem rujukan, serta integrasi intervensi gizi, sanitasi, dan edukasi kesehatan, terutama di wilayah kepulauan dan kelompok rentan.

5) Ketimpangan Akses Kesejahteraan dan Masih Tingginya Kerentanan Sosial

Penurunan tingkat kemiskinan, perbaikan Gini Ratio, dan peningkatan PDRB per kapita menunjukkan kemajuan ekonomi daerah. Namun, tingkat kemiskinan masih relatif tinggi dan ketimpangan pendapatan berada pada kategori sedang. Isu strategis yang muncul adalah memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh penduduk.

6) Struktur Ketenagakerjaan yang Masih Didominasi Pekerjaan Informal

Meskipun terjadi penurunan persentase pekerja informal dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), struktur ketenagakerjaan masih didominasi pekerjaan berupah rendah dan minim perlindungan sosial. Isu strategisnya adalah mempercepat transformasi struktur ketenagakerjaan menuju pekerjaan formal dan layak melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas,

peningkatan keterampilan, dan penguatan perlindungan sosial tenaga kerja.

7) Fluktuasi dan Ketidakstabilan Partisipasi Kerja Perempuan

TPAK perempuan menunjukkan tren meningkat, namun masih fluktuatif, mencerminkan ketidakstabilan akses kerja dan hambatan struktural seperti beban domestik dan keterbatasan keterampilan. Isu strategis yang dihadapi adalah memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan melalui peningkatan keterampilan, akses kerja ramah gender, dan dukungan sosial yang memadai.

8) Rendahnya Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan Formal

Peningkatan persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal merupakan kemajuan awal, namun capaian masih sangat rendah. Isu strategisnya adalah rendahnya akses pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja inklusif bagi penyandang disabilitas, serta keterbatasan kesiapan dunia usaha dan sistem pendukung kebijakan.

9) Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dengan Peningkatan Kualitas SDM yang Belum Optimal

Peningkatan PDRB per kapita dan pencapaian ekstensifikasi NPWP menunjukkan penguatan ekonomi dan administrasi fiskal. Namun, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan kualitas SDM, pekerjaan layak, dan pemerataan kesejahteraan. Isu strategisnya adalah memperkuat keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, formalitas usaha, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan perluasan basis pajak yang berkelanjutan.

Isu-isu strategis Pilar 2 menegaskan bahwa pembangunan kependudukan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ke depan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk secara holistik, inklusif, dan berkelanjutan, dengan fokus pada pendidikan sepanjang hayat, kesehatan ibu dan anak, transformasi ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan kelompok rentan. Pendekatan ini menjadi prasyarat utama untuk memanfaatkan bonus demografi dan mewujudkan penduduk yang produktif, sehat, dan berdaya saing hingga tahun 2050.

3) PILAR 3 – PEMBANGUNAN KELUARGA

a. Isu Strategis Utama

Pembangunan keluarga menunjukkan kemajuan yang nyata namun belum merata dan belum sepenuhnya berkelanjutan, ditandai oleh fluktuasi kualitas ketahanan dan kesejahteraan keluarga, ketimpangan akses hunian dan sanitasi aman, serta perlunya penguatan sistem perlindungan anak, pengasuhan remaja, dan kesiapan keluarga menghadapi penuaan penduduk.

b. Isu Strategis Turunan

1) Ketahanan dan Kualitas Keluarga yang Belum Stabil

Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) menunjukkan peningkatan bersih sejak 2021, dengan lonjakan signifikan pada 2023 dan stabil pada 2024. Namun, fluktuasi yang terjadi mengindikasikan bahwa ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga masih rentan terhadap dinamika sosial-ekonomi. Isu strategisnya adalah memperkuat ketahanan keluarga secara berkelanjutan melalui intervensi lintas sektor yang konsisten dan berbasis siklus hidup keluarga.

2) Keberlanjutan Sistem Perlindungan Anak yang Belum Konsisten

Indeks Perlindungan Anak mengalami fluktuasi tajam sebelum meningkat signifikan pada 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan perlindungan anak belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dan masih bergantung pada intensitas program tahunan. Isu strategisnya adalah memastikan keberlanjutan sistem perlindungan anak hingga tingkat keluarga dan komunitas untuk mencegah kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian anak.

3) Keterbatasan Akses Hunian Layak bagi Sebagian Besar Keluarga

Meskipun indikator akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan menunjukkan tren meningkat, lebih dari 40% rumah tangga masih belum menikmati hunian layak. Kesenjangan antarwilayah terutama wilayah kepulauan dan perdesaan serta keterjangkauan biaya menjadi isu utama. Hal ini menandakan perlunya percepatan kebijakan perumahan yang berkeadilan dan terintegrasi dengan penataan permukiman.

4) Akses Sanitasi Aman yang Sangat Rendah dan Menjadi Tantangan Kritis

Cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi aman masih berada pada tingkat yang sangat rendah meskipun menunjukkan tren peningkatan. Kondisi ini menjadi isu strategis serius karena berdampak langsung pada kesehatan keluarga, risiko stunting, dan penyakit berbasis lingkungan. Tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur memperkuat urgensi percepatan pembangunan sanitasi aman yang terintegrasi.

5) Kesiapan Keluarga Menghadapi Penuaan Penduduk

Indeks Lansia Berdaya meningkat secara konsisten, namun masih berada pada kategori menengah. Seiring meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia, isu strategis yang muncul adalah kesiapan keluarga dan sistem sosial dalam mendukung lansia agar tetap mandiri, sehat, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial-ekonomi.

6) Penguatan Pengasuhan Remaja di Tengah Perubahan Sosial

Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja menunjukkan capaian tinggi dan meningkat stabil, mencerminkan praktik pengasuhan yang semakin baik. Namun, variasi kualitas antar keluarga dan tantangan baru di era digital menjadi isu strategis yang perlu diantisipasi agar capaian ini merata dan berkelanjutan, terutama dalam mencegah risiko perilaku remaja.

7) Keberlanjutan Perlindungan Sosial Kesehatan bagi Keluarga

Cakupan kepesertaan JKN telah mendekati universal, menjadi fondasi penting perlindungan sosial keluarga. Meski demikian, fluktuasi pada 2021 dan tantangan pemerataan akses layanan menunjukkan perlunya penguatan keberlanjutan pembiayaan, kualitas layanan, serta integrasi JKN dengan program pembangunan keluarga lainnya.

Isu strategis Pilar 3 menegaskan bahwa pembangunan keluarga di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu diarahkan pada penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh dan berkelanjutan, dengan fokus pada perlindungan anak, pengasuhan remaja, hunian dan sanitasi layak, pemberdayaan lansia, serta perlindungan sosial kesehatan. Pendekatan ini menjadi fondasi utama dalam membangun kualitas penduduk dari unit terkecil keluarga guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan kependudukan hingga tahun 2050.

4) PILAR 4 – PENATAAN PERSEBARAN DAN PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK

a) Isu Strategis Utama

Penataan persebaran penduduk dan pengarahan mobilitas belum berjalan optimal, ditandai oleh lambatnya kemandirian pembangunan berbasis komunitas melalui Kampung Keluarga Berkualitas serta pergeseran migrasi penduduk dari masuk menjadi keluar bersih, yang berpotensi memperlebar ketimpangan wilayah dan mengurangi basis penduduk usia produktif.

b) Isu Strategis Turunan

1) Lemahnya Kemandirian Pembangunan Kependudukan Berbasis Komunitas

Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri menunjukkan stagnasi panjang pada periode 2020–2023 dan baru mengalami peningkatan terbatas pada 2024. Meskipun terjadi pelipatgandaan capaian, secara absolut nilainya masih sangat rendah. Hal ini mencerminkan bahwa pembangunan keluarga dan kependudukan di tingkat komunitas belum sepenuhnya berkelanjutan dan masih bergantung pada intervensi eksternal. Isu strategisnya adalah rendahnya kapasitas kelembagaan, pendampingan, dan integrasi lintas sektor dalam mendorong Kampung KB menuju kemandirian.

2) Ketimpangan Pengembangan Wilayah sebagai Faktor Pendorong Mobilitas Penduduk

Perubahan Migrasi Risen Neto dari positif menjadi negatif sejak 2022 menunjukkan menurunnya daya tarik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai tujuan bermukim dan bekerja. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan kesempatan ekonomi, keterbatasan lapangan kerja formal, serta perbedaan kualitas layanan dan infrastruktur antarwilayah. Isu strategisnya adalah belum optimalnya pengembangan wilayah yang mampu menahan dan menarik penduduk, khususnya usia produktif.

3) Risiko Kehilangan Penduduk Usia Produktif dan Brain Drain

Migrasi keluar yang semakin kuat berpotensi mengurangi proporsi penduduk usia produktif dan tenaga kerja terampil. Kondisi ini dapat berdampak jangka panjang terhadap produktivitas daerah, keberlanjutan pembangunan ekonomi, dan struktur demografi. Isu strategisnya adalah risiko *brain drain* (arus keluar tenaga ahli) yang belum diantisipasi secara sistematis dalam kebijakan kependudukan dan pembangunan wilayah.

4) Tantangan Penyesuaian Perencanaan Infrastruktur dan Layanan Dasar

Perubahan pola persebaran dan kepadatan penduduk akibat migrasi keluar menimbulkan tantangan dalam perencanaan infrastruktur, perumahan, transportasi, dan layanan dasar. Ketidaksesuaian antara lokasi penduduk dan ketersediaan layanan berpotensi menurunkan efisiensi pembangunan. Isu strategisnya adalah perlunya sistem perencanaan wilayah dan kependudukan yang adaptif terhadap dinamika mobilitas penduduk.

5) Keterbatasan Integrasi Kebijakan Kependudukan dan Pengembangan Kawasan

Masih lemahnya keterkaitan antara kebijakan kependudukan, pengembangan kawasan permukiman, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penghambat dalam mengarahkan persebaran penduduk secara seimbang. Isu strategisnya adalah belum optimalnya integrasi lintas sektor dalam menciptakan kawasan yang layak huni, produktif, dan menarik bagi penduduk.

Isu strategis Pilar 4 menegaskan bahwa penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu diarahkan pada penguatan pembangunan berbasis komunitas yang mandiri serta peningkatan daya tarik wilayah melalui pengembangan ekonomi lokal dan layanan dasar yang merata. Upaya ini penting untuk menahan migrasi keluar, mengelola mobilitas penduduk secara adaptif, dan mewujudkan persebaran penduduk yang seimbang dan berkelanjutan hingga tahun 2050.

5) PILAR 5 – PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

a. Isu Strategis Utama

Penataan administrasi kependudukan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah mencapai kemajuan signifikan dengan cakupan pencatatan peristiwa penting yang sangat tinggi, namun masih menghadapi tantangan keberlanjutan kualitas layanan, pemerataan akses di wilayah kepulauan, serta integrasi dan validitas data kependudukan untuk mendukung perencanaan pembangunan jangka panjang.

b. Perumusan Isu Strategis Turunan

1) Keberlanjutan dan Konsistensi Cakupan Tinggi Pencatatan Kelahiran

Cakupan kepemilikan akta kelahiran balita (0–5 tahun) telah mencapai hampir universal sejak 2023. Capaian ini mencerminkan efektivitas sistem pelayanan administrasi kependudukan. Namun, tantangan strategis ke depan adalah menjaga konsistensi layanan agar tidak terjadi penurunan cakupan, khususnya bagi balita di wilayah kepulauan, daerah terpencil, dan keluarga rentan. Isu strategisnya adalah pergeseran fokus dari perluasan cakupan menuju penguatan kualitas, kecepatan, dan integrasi layanan pencatatan kelahiran dengan layanan kesehatan ibu dan anak.

2) Masih Rendahnya Pencatatan Peristiwa Sipil Kompleks (Nikah dan Cerai)

Meskipun cakupan akta nikah dan akta cerai menunjukkan peningkatan yang signifikan, masih terdapat proporsi penduduk yang cukup besar—terutama pada pencatatan perceraian—yang belum tercatat secara resmi. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa sipil yang bersifat sosial dan administratif kompleks masih menghadapi hambatan budaya, geografis, dan kelembagaan. Isu strategisnya adalah perlunya akselerasi pencatatan nikah dan cerai melalui inovasi layanan, simplifikasi prosedur, serta penguatan koordinasi antara Disdukcapil, KUA, pengadilan, dan pemerintah desa.

3) Penguatan Kualitas dan Validitas Data Kematian

Cakupan akta kematian telah mencapai 100% bahkan melebihi, yang menunjukkan keberhasilan pencatatan peristiwa kematian secara menyeluruh. Namun, capaian di atas 100% mengindikasikan perlunya penyelarasan definisi, validasi data, dan pengelolaan backlog pencatatan. Isu strategisnya adalah menjaga akurasi, ketepatan waktu, dan konsistensi pencatatan kematian sebagai dasar pemutakhiran data kependudukan dan perencanaan pembangunan yang berbasis bukti.

4) Ketimpangan Akses Layanan Administrasi Kependudukan Antarwilayah

Wilayah kepulauan dan daerah dengan keterbatasan akses transportasi masih berpotensi mengalami hambatan dalam menjangkau layanan administrasi kependudukan, meskipun capaian agregat sudah tinggi. Isu strategisnya adalah perlunya pemerataan akses layanan melalui pendekatan jemput bola, digitalisasi layanan, dan penguatan peran pemerintah desa/kelurahan sebagai simpul pelayanan administrasi kependudukan.

5) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan dengan Layanan Publik Lainnya

Tingginya cakupan pencatatan peristiwa penting belum sepenuhnya diiringi dengan integrasi optimal antara data kependudukan dan layanan publik lainnya seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan perencanaan wilayah. Isu strategisnya adalah kebutuhan penguatan sistem informasi kependudukan yang terintegrasi, interoperabel, dan dimanfaatkan secara aktif sebagai basis perencanaan dan evaluasi pembangunan kependudukan.

Isu strategis Pilar 5 menegaskan bahwa arah penataan administrasi kependudukan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada periode 2025–2050 perlu difokuskan pada peningkatan kualitas layanan, validitas dan integrasi data, serta pemerataan akses administrasi kependudukan, sehingga data kependudukan tidak hanya lengkap secara kuantitatif, tetapi juga andal sebagai fondasi pembangunan kependudukan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

BAB II

SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2029

A. PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK

1. ARAH KEBIJAKAN

Penguatan efektivitas program pengelolaan jumlah penduduk melalui layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, inklusif, dan terjangkau.

2. STRATEGI

- a) Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Remaja
Mengakselerasi edukasi kesehatan reproduksi dan seksualitas komprehensif melalui:
 - Integrasi muatan lokal kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga dalam kurikulum satuan pendidikan (SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan pesantren),
 - Penguatan peran komunitas pemuda, kelompok konselor sebaya, PIK-R, dan organisasi berbasis pulau/pesisir, disertai perluasan literasi digital yang aman dan inklusif, guna menunda usia kawin pertama, mencegah kehamilan tidak diinginkan (KTD), dan membangun kesadaran perencanaan keluarga berbasis pilihan bertanggung jawab.
- b) Mengurangi Beban Biaya Pengasuhan dan Pendidikan Anak
Memperkuat dukungan sosial-ekonomi keluarga melalui:
 - Penyediaan insentif dan perlindungan sosial daerah yang afirmatif dan berkelanjutan (beasiswa anak pulau, bantuan pendidikan, dukungan gizi baduta/anak, subsidi transport sekolah darat-laut bagi keluarga MBR),
 - Optimalisasi skema pembiayaan terjangkau melalui sinergi APBD, JKN/PBI, BOK, dan dukungan mitra/CSR, guna mendorong keputusan berkeluarga secara terencana dan pencapaian fertilitas yang seimbang sesuai kemampuan dan kesejahteraan keluarga.
- c) Memperkuat Sosialisasi dan Kampanye Program Keluarga Berencana Berbasis Budaya Lokal
Meningkatkan efektivitas kampanye KB melalui:
 - Pengembangan KIE dan kampanye keluarga berencana berbasis budaya bahari Bugis-Makassar-Mandar, menggunakan pendekatan kearifan lokal dan bahasa daerah,
 - Pelibatan tokoh agama, tokoh adat, perempuan penggerak pesisir-kepulauan, karang taruna, serta duta pemuda pulau sebagai agen perubahan, khususnya di kecamatan/desa-kelurahan dengan tingkat kelahiran tinggi, untuk menumbuhkan penerimaan sosial bahwa perencanaan keluarga adalah pilihan sadar demi ketahanan dan kesejahteraan keluarga Pangkep.
- d) Memperluas Akses Layanan Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi yang Berkualitas, Inklusif, dan Menyeluruh
Mempercepat pemerataan layanan KBKR melalui:

- Layanan bergerak berbasis laut dan pesisir (marine/boat KB service, klinik pesisir, dan kunjungan terjadwal ke klaster pulau),
- Penyediaan layanan kontrasepsi, konseling remaja, layanan pranikah, dan rujukan kesehatan reproduksi yang ramah GEDSI, disabilitas, dan kelompok rentan,
- Penguatan distribusi logistik kontrasepsi di titik dermaga kecamatan dan puskesmas pulau dengan sistem last-mile logistic atau proses pengiriman tahap paling akhir, yaitu dari titik penyimpanan/distribusi terakhir di tingkat daerah langsung ke fasilitas layanan atau pengguna akhir yang akan memakai atau memberikan layanan kontrasepsi. Hal ini untuk menjamin akses tanpa diskriminasi dan tanpa hambatan keterjangkauan, terutama di wilayah 3T dan pulau-pulau.

B. PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK

1. ARAH KEBIJAKAN

Transformasi sistem pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan bonus demografi secara inklusif.

2. STRATEGI

a) Mewujudkan Pemerataan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar-Menengah yang Inklusif dan Menjangkau Wilayah Kepulauan

- Memastikan akses pendidikan dasar dan menengah berkualitas di seluruh kecamatan, pesisir, dan klaster pulau, melalui:
 - Distribusi guru merata, peningkatan kompetensi pendidik, rehabilitasi sarpras sekolah, dan penguatan pembelajaran digital luar ruang pulau,
 - Afirmasi beasiswa, bantuan transport laut-darat, dan dukungan perlengkapan sekolah bagi anak pulau/MBR/kelompok rentan, guna menyiapkan generasi usia produktif yang berdaya saing sebagai modal utama bonus demografi daerah.

b) Memperkuat *Link and Match* Pendidikan, Pelatihan, dan Kebutuhan Pasar Kerja Berbasis Potensi Ekonomi Pesisir-Kepulauan

- Meningkatkan keselarasan pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan tenaga kerja lokal dan regional, melalui:
 - Penguatan pendidikan vokasi dan kurikulum berbasis kompetensi sektor unggulan Pangkep (perikanan, kemaritiman, agrobisnis, pariwisata pulau, UMKM, dan industri penyangga Makassar),
 - Penguatan BLK daerah dan pelatihan kerja mobile di pulau,
 - Kemitraan industri, skema magang, dan job-matching digital bagi pemuda, untuk meningkatkan serapan tenaga kerja usia muda, mengurangi pengangguran, dan memaksimalkan produktivitas usia produktif dalam periode bonus demografi.

c) Mempercepat Penurunan Stunting melalui Intervensi Gizi, Sanitasi, dan Edukasi Kesehatan yang Terintegrasi dan Aksesibel

- Menyelenggarakan intervensi konvergensi stunting lintas daratan-pesisir-kepulauan, melalui:
 - Perluasan akses gizi ibu-anak, kampanye gizi, penguatan posyandu dan posyandu pesisir-kepulauan,
 - Percepatan penyediaan sanitasi layak, air bersih, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) berbasis komunitas pulau,
 - Edukasi kesehatan keluarga dan remaja secara berkelanjutan, untuk memastikan pertumbuhan anak optimal dan generasi produktif yang sehat, bebas malnutrisi, dan siap memasuki usia kerja.

d) Memperkuat Pemerataan dan Jangkauan Perlindungan Sosial di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan secara Berkelanjutan dan Berkeadilan

- Mengembangkan sistem perlindungan sosial terintegrasi, terjangkau, dan tepat sasaran yang menjangkau kelompok MBR, perempuan, pemuda, keluarga nelayan/petani, dan masyarakat di klaster pulau, melalui:
 - Perluasan jaminan sosial daerah (PBI/JKN daerah), insentif pendidikan, bantuan kesehatan ibu-anak-remaja, dan pelatihan kerja gratis/subsidi,
 - Kemitraan dukungan sosial-ekonomi untuk keluarga dan pemuda pulau, guna mengurangi hambatan biaya layanan dasar, meningkatkan partisipasi pendidikan, memperluas jangkauan kesehatan keluarga, dan mempercepat kesiapan tenaga kerja produktif sebagai katalis optimalisasi bonus demografi Pangkep secara seimbang dan berkelanjutan.
- e) Membangun Tata Kelola Kebijakan Bonus Demografi yang Kolaboratif Berbasis Data Terpilah Wilayah (Penguat Kontekstual Pangkep)
 - Mengonsolidasikan data demografi terpilah daratan-pesisir-kepulauan (Dukcapil, BPS, Dinkes, Disnaker, Pendidikan, dan OPD KB).
 - Mengembangkan Dashboard Demografi Inklusif Pangkep sebagai basis perumusan perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan dan Monev lintas sektor pembangunan kependudukan.

3. TARGET 2025 – 2029

Tujuan Strategi	Indikator	Satuan	baseline (2024)	Sumber Data	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
- Mewujudkan pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah secara inklusif, khususnya bagi remaja dan anak usia sekolah di wilayah daratan, pesisir, dan klaster pulau, sebagai modal peningkatan kualitas generasi produktif untuk mengoptimalkan bonus demografi daerah. - Meningkatkan keselarasan	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	Tahun	8,47	DISDIKBUD	8,69	8,89	9,09	9,29	9,49
	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi	%	41,83	DP2KBP3A	91,73	92,10	92,48	92,85	93,23
	Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi kompetensi kerja (Persentase penduduk bersertifikat keahl ian)	%	2,16	DISNAKER	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat	%	9.32	DINKES	23,59	21,67	19,76	17,84	15,92

sistem pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja berbasis potensi ekonomi biru dan hijau Pangkep, guna mempercepat kesiapan dan penyerapan tenaga kerja usia muda melalui penguatan kompetensi, magang, sertifikasi, dan penciptaan peluang kerja yang adaptif dan inklusif.	pendek) pada									
	balita									
	Angka Kematian Balita (AKB)	Jumlah	51	RIBK	45	43	41	39	37	
	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah	5	RIBK	8	7	6	6	5	
	Tingkat Kemiskinan	%	12,41	RPJMD	11,60	11,55	11,05	10,54	9,86	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita	%	58,16	DP2KBP3A	60,47	10,84	62,86	65,35	67,94	70,63
	Percentase Pekerja Informal	%	54,38	Bapperida	53,2	52,46	51,71	50,97	50,22	
	Percentase Penyangandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Indeks	2,80	Bapperida	3,35	4,16	4,97	5,78	6,59	
	Gini Ratio	Angka	0,317	RPJMD	0,311	0,304	0,300	0,290	0,286	
	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	96,36	RPJMD	101,36	107,33	112,8	118,16	132,32	

- Mempercepat penurunan stunting melalui intervensi gizi, sanitasi layak,

C. PEMBANGUNAN KELUARGA

1. ARAH KEBIJAKAN

Penguatan ketahanan dan fungsi keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

2. STRATEGI

a) Penguatan Literasi dan Layanan Pengembangan Keluarga Sejak Fase Pranikah

- Menyelenggarakan edukasi pranikah terpadu di KUA, Puskesmas, dan lembaga pendidikan/komunitas kepulauan-pesisir.
- Mendorong literasi keuangan dan perencanaan ekonomi rumah tangga (literasi keuangan keluarga nelayan, UMKM olahan hasil laut, agrobisnis daratan-pulau).
- Menyediakan layanan konseling keluarga berkelanjutan, termasuk melalui opsi konseling jarak jauh/pendampingan kader pulau untuk mewujudkan keluarga yang siap menikah, siap finansial, dan siap merencanakan kelahiran secara bertanggung jawab.

b) Penguatan Tata Kelola Kebijakan dan Kemitraan Ramah Keluarga Berbasis Sinergi Multipihak

- Membangun kolaborasi terstruktur antara pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan komunitas kepemudaan kepulauan.
- Mendorong kebijakan ramah keluarga (family friendly policy) di sektor pelayanan publik, ketenagakerjaan lokal, dan dukungan CSR untuk wilayah pulau.
- Mengembangkan kemitraan untuk perlindungan ekonomi keluarga (dukungan bagi keluarga MBR, nelayan, petani, dan pelaku usaha pulau) guna menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung keluarga sebagai unit utama pembangunan kualitas penduduk.

c) Penyediaan Ekosistem Dukungan Keluarga Berbasis Komunitas hingga Klaster Pulau

- Mengembangkan layanan dukungan keluarga berbasis desa/komunitas seperti:
 - Ruang bermain anak aman dan inklusif, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga/PIK Keluarga), kelas parenting desa, PKBM pulau, dan ruang kreatif pemuda pulau.
- Mengoptimalkan pendampingan kader lokal (TP-PKK, PPKBD/Sub-PPKBD, kader Posyandu Keluarga, karang taruna pulau).
- Mendukung pemanfaatan balai desa/dermaga pulau sebagai titik layanan KIE dan hub pembelajaran keluarga, untuk memastikan layanan penguatan fungsi keluarga tersedia, dekat, partisipatif, dan berkelanjutan di wilayah darat-laut-pulau.

- d) Penguatan Peran Keluarga dalam Pengasuhan dan Pembentukan Karakter Anak Berbasis Nilai Lokal
- Meningkatkan kapasitas keluarga dalam pengasuhan dan pembentukan karakter anak yang:
 - responsif gender, anti-kekerasan, mendukung pendidikan dan kesehatan anak.
 - Mengarusutamakan nilai budaya lokal Bugis-Makassar-Mandar dan karakter masyarakat bahari dalam program pengasuhan dan KIE keluarga.
 - Memperkuat peran ayah-ibu secara setara dalam pola pengasuhan.
 - Mendorong gerakan keluarga peduli pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak di pulau dan pesisir, guna membentuk generasi muda Pangkep yang berkarakter, sehat, dan siap menjadi penduduk usia produktif berkualitas.
- e) Penguatan Ketahanan Psikososial dan Perlindungan Internal Keluarga terhadap Tekanan Kerentanan
- Memperkuat ketahanan psikososial keluarga melalui:
 - Layanan dukungan kesehatan mental keluarga dan remaja, kelompok dukungan sebaya, konseling sekolah/pesantren, dan rujukan psikososial berbasis puskesmas daratan-pulau.
 - Pelatihan ketahanan keluarga bagi keluarga nelayan dan MBR dalam menghadapi tekanan sosial-ekonomi.
 - Pendampingan budaya dan sosial untuk mencegah perkawinan anak, KTD, kekerasan dalam rumah tangga, dan tekanan sosial lain akibat keterisolasian wilayah, guna mewujudkan keluarga yang tangguh, adaptif, dan terlindungi dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di wilayah kepulauan serta penyangga urban Makassar.

3. TARGET 2025 – 2029

Tujuan Strategi	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	Sumber Data	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	
• Meningkatkan kesiapan berkeluarga pada fase pranikah dan rumah tangga baru, ditandai dengan meningkatnya akses edukasi pranikah. literasi keuangan. dan konseling keluarga yang berkualitas dan merata hingga klaster pulau-pesisir. Terwujudnya lingkungan kebijakan dan dukungan multipihak	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	%	61,2	DP2KBP3A	63,00	64,55	66,10	67,65	69,2	
	Indeks Perlindungan Anak	%	73,49	DP2KBP3A	76,52	79,56	82,59	85,62	88,65	
	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak. Terjangkau. dan Berkelanjutan	%	53,07	DISPERKIMTAN	54.57	56.68	58.80	60.92	63.04	
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	2.39	DPUTR	4,16	4,6	5,03	5,47	5,91	
	Indeks Lansia Berdaya	%	58	DP2KBP3A	59,2	60,6	62,2	64	66	
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja Cakupan (Persentase)	%	84,6	DP2KBP3A	86,2	87,8	89,4	91	92,6	
		%	99,67	DINKES	99,67	100	100	100	100	

yang ramah keluarga. melalui sinergi pemerintah. dunia usaha. dan masyarakat dalam penyediaan dukungan sosial ekonomi keluarga. khususnya bagi keluarga MBR. nelayan. dan pelaku UMKM lokal di daratan dan kepulauan.	Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)								
• Tersedianya ekosistem layanan dukungan keluarga berbasis komunitas yang aman.									

D. PENATAAN PERSEBARAN DAN PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK

1. ARAH KEBIJAKAN

Peningkatan kualitas hidup di kawasan perkotaan dan perdesaan melalui pemerataan pembangunan, penataan penduduk, dan tata ruang berkelanjutan.

2. STRATEGI

a) Revitalisasi dan Penguatan Kualitas Hidup Penduduk di Kawasan Perdesaan dan Klaster Kepulauan

- Menjamin pemerataan layanan dasar (air minum layak, sanitasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, serta layanan administrasi kependudukan) hingga desa daratan, pesisir, dan pulau-pulau berpenduduk.
- Mengembangkan infrastruktur wilayah yang memperkuat mobilitas dan akses layanan dengan skema *last mile connectivity* berbasis dermaga, rute perintis antarpulau, dan transportasi darat-laut.
- Mendorong penataan distribusi penduduk desa dan pulau melalui pengembangan sentra permukiman terarah, aman, dan tahan iklim di perdesaan-pesisir-kepulauan.
- Memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi desa bahari dan agraris (perikanan tangkap, budidaya, industri olahan hasil laut, pertanian, agrowisata, dan UMKM desa/pulau), guna mewujudkan desa dan keluarga pulau yang berketahanan, layak huni, dan produktif secara demografis.

b) Penataan Ruang Perkotaan yang Adaptif, Ramah Penduduk, dan Berkelanjutan

- Menyusun perencanaan ruang urban berbasis RTRW dan RDTR yang adaptif, mencakup pengendalian permukiman padat serta penataan kawasan strategis perkotaan agar ramah pengasuhan, ramah gender, dan mudah diakses penduduk.
- Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berkualitas, ruang budaya, dan ruang publik interaktif untuk memperkuat interaksi sosial penduduk yang sehat dan inklusif, guna mendukung peningkatan kualitas hidup penduduk perkotaan secara berkelanjutan.

c) Mitigasi dan Adaptasi Penataan Penduduk terhadap Perubahan Iklim di Perkotaan dan Perdesaan-Kepulauan

- Menerapkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis kawasan penduduk baik di perkotaan maupun desa pesisir dan klaster pulau melalui: pengendalian banjir, pencegahan abrasi/krisis air, penyediaan permukiman tahan iklim, serta edukasi keluarga peduli lingkungan.
- Mengembangkan pemodelan mitigasi iklim berbasis keluarga dan komunitas desa/pulau, termasuk sistem peringatan dini risiko kependudukan akibat bencana bahari dan hidrometeorologi, guna melindungi keberlanjutan hidup penduduk, menjaga kelayakan ruang hunian, dan menurunkan kerentanan wilayah berpenduduk.

- d) Konvergensi Tata Ruang, Penataan Penduduk, dan Pengembangan Ekonomi Wilayah sebagai Pendukung Bonus Demografi Berbasis Hunian Layak dan Produktif
- Menyusun perencanaan mikro tata ruang dan kependudukan berbasis data geospasial desa-pesisir-kepulauan, untuk mengidentifikasi kantong permukiman padat dan desa/pulau prioritas intervensi.
 - Memperkuat kolaborasi pemerintah-dunia usaha-komunitas lokal dalam pengembangan RTH, dukungan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja berbasis ekonomi biru dan hijau di kawasan berpenduduk.
 - Mengintegrasikan kebijakan pemerataan infrastruktur + pengembangan ekonomi ruang-hunian, agar penataan penduduk selaras dengan peluang ekonomi, kualitas kesehatan, dan akses pendidikan, guna menjadikan hunian layak dan ruang produktif sebagai basis generasi usia produktif berkualitas (bonus demografi) di darat maupun antar klaster pulau.

3. TARGET 2025 – 2029

Tujuan Strategi	Indikator		Baseline (2024)	Sumber Data	Target					
- Terwujudnya pemerataan akses layanan dasar dan infrastruktur wilayah yang menjamin kelayakan hidup penduduk di perdesaan, pesisir, dan klaster pulau (air minum, sanitasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, administrasi dan kependudukan). - Meningkatnya kesesuaian penataan distribusi penduduk dan ruang hunian berbasis RTRW/RDTR yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan tahan terhadap	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	1,94	DP2KBPP3A	2025	2026	2027	2028	2029	
					48,54	56,31	66,02	75,73	85,44	
	Rate Nett Recent Migrasi	%	-6,64	PROFIL KEPENDUDUKAN DUKCAPIL	-0,575	1,51	3,595	5,68	7,77	

pembelajaran keluarga di perkotaan dan desa-pulau/gunung. • Meningkatkan konektivitas mobilitas penduduk dan akses peluang ekonomi-sosial antarwilayah. terutama melalui penguatan fungsi transportasi perintis darat-laut. rute antarpulau. dan hub layanan kecamatan/dermaga. • Menurunkan tingkat kerentanan kependudukan akibat tekanan sosial-ekonomi dan dampak iklim/bencana di kawasan berpenduduk. melalui pendekatan									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E. INTEGRASI DATA KEPENDUDUKAN

1. ARAH KEBIJAKAN

Mengembangkan database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan tinggi serta dikelola dalam sistem yang integratif, mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

2. STRATEGI

- a) Memperkuat Pelayanan Prima Administrasi Kependudukan Berbasis Konektivitas Darat-Laut-Pulau
Menjamin pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang cepat, transparan, dan non-diskriminatif melalui:
 - Unit layanan jemput bola antarpulau dan pesisir (*mobile service, layanan perintis laut, dan pemanfaatan dermaga sebagai titik layanan perekaman dokumen*).
 - Digitalisasi layanan dokumen kependudukan yang responsif terhadap akses internet di desa dan kawasan pulau.
 - Kolaborasi layanan dari daratan ke kepulauan melalui puskesmas, KUA, desa, dan sekolah sebagai simpul pelayanan, guna memastikan tidak ada penduduk yang terhambat pengurusan dokumen akibat kondisi geografis kepulauan.
- b) Mendorong Tertib dan Kepatuhan Tertinggi terhadap Administrasi Kependudukan di Level Desa, Pesisir, dan Klaster Pulau
Membangun sistem penataan dan pengendalian administrasi data penduduk yang konsisten, melalui:
 - Registrasi dan pemutakhiran data penduduk secara berkala by name by address berbasis desa/kelurahan dan klaster pulau.
 - Penguatan regulasi daerah untuk kedisiplinan pelaporan peristiwa kependudukan (kelahiran, kematian, pindah datang, perkawinan, perceraian).
 - Peningkatan kepatuhan pencatatan sipil kapil dan desa, serta penguatan verifikasi dokumen AKA data, guna terwujudnya keandalan dan kedisiplinan data yang menjadi ciri database kependudukan yang tepercaya di Kabupaten Pangkep.
- c) Membangun Integrasi Database Kependudukan dalam Sistem Satu Data yang Interoperabel antar Instansi dan Simpul Pulau-Pesisir
Mengembangkan database kependudukan terpusat (Sistem Satu Data Pangkep) melalui:
 - Sinkronisasi dan integrasi data antar-OPD (Disdukcapil, BPS, Dinkes, Disdik, Disnaker/BLK, OPD KB, Puskesmas, KUA, TP-PKK, Desa/Kelurahan).
 - Standar interoperabilitas database berbasis NIK>Nama/Alamat sebagai pengunci integrasi data.
 - Sistem distribusi dan pelaporan last-mile data dari pulau ke server kabupaten, guna menghilangkan fragmentasi data, memperkuat akurasi, konsistensi antar sumber, dan kecepatan pembaruan data wilayah 3T darat-laut-pulau.

d) Meningkatkan Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Demografi Sebagai Basis Kebijakan, Perencanaan, Penganggaran, dan Kolaborasi Pembangunan

Memperluas pemanfaatan data dan informasi kependudukan melalui:

- Dashboard Demografi dan Ketenagakerjaan Terpilah Wilayah (daratan, perdesaan, pesisir, dan klaster pulau).
- Penyediaan data proyeksi dan indikator demografi sektoral (fertilitas, stunting, usia sekolah, dinamika migrasi, dan kesiapan kerja pemuda).
- Akses terbuka bertingkat bagi pemangku kebijakan, akademisi, mitra pembangunan dan dunia usaha/CSR/UMKM, guna memastikan data kependudukan menjadi modal pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan berdampak langsung pada pemerataan kualitas hidup penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

3. TARGET 2025 – 2029

Tujuan/Strategi	Indikator		Baseline (2024)	Sumber Data	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
- Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang menjangkau wilayah kepulauan dan pesisir. melalui percepatan layanan <i>jemput bola</i> darat-laut. digitalisasi dokumen. dan perluasan simpul pelayanan di desa. puskesmas. sekolah. dan dermaga pulau. - Meningkatkan keterlibatan dan kepatuhan administrasi kependudukan	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	%	99.79	DUKCAPIL	99.91	100	100	100	100

tenaga kerja muda di kawasan urban. desa. dan pulau. • Menjamin aksesibilitas data kependudukan yang aman. mudah. dan inklusif. bagi pemerintah daerah. DPRD. akademisi. lembaga masyarakat. dan mitra pembangunan. guna memperkuat intervensi berbasis bukti (<i>evidence-based planning</i>) dan pemerataan hasil Pembangunan								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB III

RENCANA AKSI TAHUN 2025-2029

A. TATA KELOLA PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

1. Tim Koordinasi Pelaksana PJPk

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pangkejene dan Kepulauan Nomor 895 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPk). Berikut struktur Tim Koordinasi Pelaksana PJPk di Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pengarah | 1. Bupati |
| | 2. Wakil Bupati |
| | 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah |
| | 4. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah |
| | 5. Ketua Tim Penggerak PKK |
| 2. Ketua | Sekretaris Daerah |
| 3. Wakil Ketua | Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah |
| 4. Sekretaris | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5. Anggota | 1. Kepala Dinas Kesehatan |
| | 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 4. Kepala Dinas Sosial |
| | 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| | 6. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian |
| | 7. Kepala Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| | 8. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian |
| | 9. Kepala Dinas Ketenagakerjaan |
| | 10. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup |
| | 13. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan |
| | 14. Kepala Kantor Kementerian Agama |
| | 15. Kepala Badan Pusat Statistik |
| | 16. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan |
| | 17. Kepala Bagian |
| | 18. Camat se-Kabupaten |

Kesekretariatan

- | | |
|---------|--|
| Ketua | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengendalian Manusia Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah |
| Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Kepala Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 3. Kepala Bidang Pembangunan, Inovasi, dan Teknologi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 5. Perencana Ahli Muda Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan Umum pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 6. Analisa Perencanaan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 7. Pengelola Program pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah |

Kelompok Kerja:

a) Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk

- | | |
|----------|---|
| 1) Ketua | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|----------|---|

- | | |
|------------|--|
| 2) Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Unit Pelayanan Teknis Keluarga Berencana se-Kabupaten 2. Kepala Puskesmas se-Kabupaten 3. Penyuluh Keluarga Berencana se-Kabupaten 4. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD) se-Kabupaten 5. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan se-Kabupaten |
|------------|--|

b) Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk

- | | |
|----------|---|
| 1) Ketua | Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan |
|----------|---|

- | | |
|------------|--|
| 2) Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup |
|------------|--|

2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
 3. Kepala Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Peningkatan Produktivitas Pada Dinas Ketenagakerjaan
 4. Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 5. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan
 6. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 7. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 8. Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 9. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
 10. Kader Rumah Data Kependudukan se-Kabupaten
 11. Ketua Ikatan Bidan Indonesia se-Kabupaten
 12. Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana
- c) Bidang Pembangunan Keluarga
- 1) Ketua Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 2) Anggota
 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Anak Dinas dan Perlindungan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 2. Kepala Bidang Kesetaraan Gender Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 3. Kepala Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial Dinas Sosial
- d) Bidang Persebaran Penataan Pengarahannya Mobilitas Penduduk
- 1) Ketua Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - 2) Anggota Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian

e) Bidang Penataan Administrasi Kependudukan

- 1) Ketua Kepala Bidang Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2) Anggota
 1. Kepala Bidang Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 2. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2. Tugas Tim Koordinasi Pelaksana GDPK/PJPK

Tugas Tim Koordinasi Pelaksana GDPK/PJPK:

1. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan PJPK
2. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program serta kegiatan pembangunan kependudukan antar sektor terkait
3. Melakukan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan PJPK
4. Mengevaluasi pelaksanaan PJPK

Dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana, untuk mendukung efektivitas penyusunan dan pelaksanaan PJPK, dapat disusun tim kelompok kerja (Pokja) dengan menyesuaikan sasaran pembangunan kependudukan dalam PJPK. Tugas Tim Pokja PJPK daerah:

1. Mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan strategi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugas kelompok kerja
2. Mengkoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan sesuai lingkup kewenangan bidang kelompok kerja
3. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Menyusun rencana aksi PJPK sesuai tugas dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pokja.

B. RENCANA AKSI

1. Rencana Aksi Pengelolaan Kuantitas Penduduk

No	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Instansi Utama	Instansi Pendukung
1	Total Fertility Rate (TFR)	Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	• Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan • Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga • Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana • Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota • Advokasi. Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS. serta Jalur Nonformal dan Informal	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Dinas Kesehatan • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Dinas Sosial • Dinas Ketenagakerjaan

			• Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Berserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan • Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Berserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan • Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota • Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks	
--	--	--	---	--

			• Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK) • Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota • Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah		
2	Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah • Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga • Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Dinas Kesehatan • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Dinas Sosial

			• Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga • Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB • Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini • Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota • Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan • Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga • Pengembangan Model Solusi Strategis • Pengendalian Dampak Kependudukan • Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB		
--	--	--	--	--	--

3	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	• Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya • Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) • Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP • Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB • Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB • Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB • Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Kesehatan
---	--------------------------------------	---	--	---	---	-----------------

			Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya • Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi • Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak • Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB • Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan		
--	--	--	---	--	--

2. Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Penduduk

No	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Instansi Utama	Instansi Pendukung
4	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah - Pembangunan Perpustakaan Sekolah - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Dinas Kesehatan - Dinas Sosial - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - Dinas Perhubungan - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

			• Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah • Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah /Guru/ Penjaga Sekolah • Pengadaan Mebel Sekolah • Pengadaan Perlengkapan Sekolah • Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa • Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar • Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
--	--	--	--	--	--

			• Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah • Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar • Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar • Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar • Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan • Pengembangan konten digital untuk Pendidikan • Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan • Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
--	--	--	--	--	--

			• Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan • Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Penyediaan infrastruktur TIK • Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi • Penataan Ruang/Sudut Baca • Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik • Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik • Pembangunan Ruang Kelas Baru • Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana.		
--	--	--	--	--	--

			• Prasarana dan Utilitas Sekolah • Bimbingan Teknis. Pelatihan. dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan • Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik • Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah • Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus • Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar • Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	• Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) • Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TV	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	• Dinas Perpustakaan dan Kearsipan • Dinas Kesehatan

			• Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah • Pembangunan Perpustakaan Sekolah • Pembangunan Laboratorium • Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula • Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah • Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah • Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah • Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah • Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah • Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	• Dinas Sosial • Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • Dinas Perhubungan • Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
--	--	--	---	--

			• Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula • Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah • Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah • Pengadaan Mebel Sekolah • Pengadaan Perlengkapan Sekolah • Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama • Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa • Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan		
--	--	--	---	--	--

			Sekolah Menengah Pertama • Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama • Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah • Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama • Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama • Pembinaan Penggunaan Teknologi. Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan • Pengembangan konten digital untuk Pendidikan		
--	--	--	--	--	--

			• Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan • Koordinasi. • Perencanaan. Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan • Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan • Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi • Penataan Ruang/Sudut Baca • Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik • Pembangunan Ruang Kelas Baru		
--	--	--	---	--	--

			• Bimbingan Teknis. Pelatihan. dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan • Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik • Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik • Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU • Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus • Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik • Penyediaan infrastruktur TIK		
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	• Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD • Pengadaan Mebel PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

			• Pengadnan Perlengkapan PAUD • Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD • Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD • Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD • Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD • Pengelolaan Dana BOP PAUD • Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD • Pengembangan konten digital untuk Pendidikan		
--	--	--	---	--	--

			• Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan • Koordinasi. • Perencanaan. Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan • Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan • Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Pembangunan Ruang Kelas Baru • Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi • Bimbingan Teknis. Pelatihan. dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		
--	--	--	--	--	--

			• Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) • Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik • Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak • Berkebutuhan Khusus • Rehabilitasi • Sedang/Berat Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD • Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD • Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD • Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU • Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah • Rehabilitasi • Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		
--	--	--	---	--	--

			• Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	• Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan • Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan • Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan • Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan • Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan • Pembinaan Penggunaan Teknologi. Informasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

			• dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan • Pengembangan konten digital untuk Pendidikan • Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan • Koordinasi. • Perencanaan. Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan • Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan • Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi • Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi		
--	--	--	--	--	--

			pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan • Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik • Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik • Pembangunan Ruang Kelas Baru • Pengadaan Perlengkapan Sekolah • Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah • Bimbingan Teknis. Pelatihan. dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan • Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		
--	--	--	--	--	--

			• Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal • Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutruhan Khusus • Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik • Nonformal/Kesetaraan • Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat • Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		
	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	• Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	• Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan • Penataan Pendistribusian	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

	penduduk bersertifikat keahl ian)			Dinas Koperasi. UMKM. Perdagangan. dan Perindustrian
7	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Dinas Kesehatan - Dinas Pengendalian Penyakit - Dinas Kesehatan Ibu Hamil - Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Dinas Pengelolan Pelayanan Kesehatan Balita - Dinas Pengelolan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - Dinas Pengelolan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif - Dinas Pengelolan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Dinas Pengelolan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - Dinas Pengelolan Pelayanan Promosi Kesehatan
				- Dinas Pengendalian Penyakit - Dinas Kesehatan Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Sosial - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Pertanian - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Perikanan

			• Pengelolaan Surveilans Kesehatan • Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		• Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	• Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	
8	Angka Kematian Balita (AKB)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir • Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan • Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat • Operasional Pelayanan Rumah Sakit • Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	• Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Dinas Sosial • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

			• Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	• Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	• Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	
9	Angka Kematian Ibu (AKI)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat • Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	• Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

			• Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat • Operasional Pelayanan Rumah Sakit • Operasional Pelayanan Puskesmas • Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		• Dinas Sosial • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Dinas Ketenagakerjaan
		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	• Pengembangan Puskesmas • Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan • Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) • Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan	

			• Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan <u>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</u>
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
10	Tingkat Kemiskinan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bantuan Sosial Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi	Pelaksanaan Kebijakan .Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Bagian Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan. Riset dan Inovasi Daerah

		Negeri dan Swasta (Bansos)			
	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	
		Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas Perikanan	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	• Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota • Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan	Dinas Perikanan	

			dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	
	Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Dinas Perpustakaan	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Antenatal Care Pada Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	
		Pelayanan Kesehatan pada Ibu Bersalin sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	

			Pelayanan Kesehatan pada Balita sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	
			Pelayanan Kesehatan pada anak Usia Pendidikan Dasar sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	
			Pelayanan Kesehatan pada penduduk usia produktif yaitu 15-59 Tahun sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	
			Pelayanan Kesehatan pada penduduk usia 60 Tahun keatas sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	
			Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	
			Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Melitus sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	
			Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	

			Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	
			Pelayanan Kesehatan lingkungan pada Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	
			Pelayanan Kesehatan pada penderita jiwa dan Napza	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinas Kesehatan	
			Pelayanan Kesehatan yang mencakup penyakit menular dan tidak menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	
			Pelaksanaan kegiatan pembiayaan kesehatan pada Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial		

		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyangdang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	• Penyediaan Permakanaan • Penyediaan Sandang • Penyediaan Alat Bantu • Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyangdang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat • Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan. Akta Kelahiran. Surat Nikah. dan Kartu Identitas Anak • Pemberian Layanan Data dan Pengaduan • Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinas Sosial	
		Rehabilitasi Sosial Penyangdang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban		• Pemberian Layanan Data dan Pengaduan • Penyediaan Permakanaan	Dinas Sosial	

			• Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA • Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Dinas Sosial
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial

		Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	• Penyediaan Makanan • Penyediaan Sandang	Dinas Sosial	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	• Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar • Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	• Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama • Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	• Pembangunan Sarana. Prasarana dan utilitas sekolah • Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

			• Rehabilitasi sedang/berat sarana. prasarana dan utilitas sekolah • Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah • Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah • Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah • Rehabilitasi sedang/berat sarana. prasarana dan utilitas sekolah • Penambahan Ruang Kelas Baru		
	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	• Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk • Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KIA. Formulir. dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil	

			Sesuai dengan Kebutuhan • Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan • Pelayanan Secara Aktif Pendafitaraan Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendafitaraan Penduduk		
	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	• Pencatatan. penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting • Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil	
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	• Pelayanan Secara Aktif Pendafitaraan Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil • Sosialisasi terkait pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil	

		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	• Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan • Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil	
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil	
		Program Pengelolaan Pelayanan	Pembangunan. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	• Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal • Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dinas Perhubungan	
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Ketenagakerjaan	

			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Ketenagakerjaan	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/ Bursa Kerja		Dinas Ketenagakerjaan	
		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja		Dinas Ketenagakerjaan	
	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendaftaran dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Dinas Ketenagakerjaan	
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Dinas Ketenagakerjaan	

		Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	<u>Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan</u>	
		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	• Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni • Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	<u>Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan</u>	
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	<u>Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan</u>	
		Program Peningkatan Prasarana. Sarana Dan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	• Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	<u>Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan</u>	

		Utilitas Umum (PSU)		• Kerja sama Penyediaan/ pengelolaan PSU Perumahan		
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/ kelahiran. Baduta/ Balita)	<u>Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</u>		
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		

		Dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	• Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa • Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa • Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa • Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Rogan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

		Dan Masyarakat Hukum Adat	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Balocci	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Balocci	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Minasatene	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Minasatene	

		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Kescimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Dinas Ketahanan Pangan	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerenntanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	• Penyusunan. Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerenntanan Pangan • Pelaksanaan Pengadaan. Pengelolaan. dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan	
		Program Pemberdayaan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan	• Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Koperasi UKM Perdagangan	

	Usaha Menengah. Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro	melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan. Perizinan. Penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	dan Perindustrian	
	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro	Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	
	Program Pengedalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan. Hortikultura. dan Perkebunan	Dinas Pertanian	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan. Rehabilitas dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada	- Pembangunan Jaringan Irigasi Permuakaan - Rehabilitasi Bendung Irigasi	Dimas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

			Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha. dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan	• <u>Dinas Koperasi. Usaha Kecil. Menengah. Perdagangan dan Perindustrian</u> • Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

					• <u>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</u> • <u>Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga</u>
12	Persentase Pekerja Informal	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	• <u>Dinas Ketenagakerjaan Dinas Koperasi</u> • <u>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</u> • <u>Kecamatan</u>
13	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	• <u>Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan</u>	• <u>Dinas Ketenagakerjaan</u> • <u>Dinas Sosial</u> • <u>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</u> • <u>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</u>
14	Gini Ratio	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian Ketimpangan Wilayah dan Sosial	• <u>Analisis Gini Ratio kab/kota tahunan</u>	• <u>Bapperida</u> • <u>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</u> • <u>Dinas Kesehatan</u>

				• Pemetaan kantong ketimpangan pendapatan • Sinkronisasi intervensi OPD penurun ketimpangan • Evaluasi dampak program terhadap Gini Ratio		• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan Persandian • Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	• Pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri • Sertifikasi kompetensi tenaga kerja miskin & rentan • Penempatan tenaga kerja lokal • Perlindungan pekerja informal	Dinas Ketenagakerjaan	• Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
15	PDRB Perkapita	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Daerah	• Penyusunan kebijakan peningkatan PDRB per kapita • Analisis sektor unggulan dan kontribusi PDRB	Bapperida	• Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

			• Penyusunan dokumen perencanaan ekonomi daerah • Monitoring dan evaluasi capaian PDRB per kapita	• Dinas Pertanian • Dinas Perikanan • Dinas Pariwisata	
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Ketenagakerjaan • Dinas Sosial • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi (Persentase kepemilikan NPWP)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Basis Data dan Potensi Pendapatan	• Pendataan dan pemutakhiran potensi wajib pajak • Sinkronisasi data NPWP dengan data usaha & kependudukan • Fasilitasi pendaftaran NPWP bagi pelaku usaha & pekerja mandiri • Kerja sama Pemda-DJP dalam ekstensifikasi WP	<u>Badan Pendapatan Daerah</u> • Badan Keuangan dan Aset Daerah • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3. Rencana Aksi Pembangunan Keluarga

No	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Instansi Utama	Instansi Pendukung
18	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	• Pengendalian Program KKBPK • Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana • Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) • Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Dinas Kesehatan • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Sekretariat Daerah • Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

</					

				Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	• Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
19	Indeks Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota	• Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota • Kerjasama para pihak dalam pencegahan KTA Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

			• Penyusunan kebijakan pencegahan KIA (Strada. RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota		
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	• Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota • Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota • Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota • layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota • layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

			Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota • Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota • Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	• Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota • koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

			• tingkat daerah kabupaten/kota • Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
20	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak. Terjangkau. dan Berkelanjutan	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	• Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan • Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Dinas Sosial • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

				• Sekretariat Daerah
	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	• Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	• Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	• Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	• Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
21	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	• Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota • Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	• Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • Dinas Kesehatan • Dinas <u>Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan</u>

				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22	Indeks Lansia Berdaya	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	- Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	- Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Kesehatan - Dinas Sosial - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	- Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	- Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kesehatan - Dinas Sosial

			Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) • Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) • Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) • Penyediaan Biaya Operasional bagi		
--	--	--	---	--	--

			Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) • Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta	• Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga	

			Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita) • Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita)	Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
24	Cakupan (Persentase) Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	• Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial	• Dinas Kesehatan • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Dinas Ketenagakerjaan

4. Rencana Aksi Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

No	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Instansi Utama	Instansi Pendukung
25	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	• Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas • Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas • Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Sekretariat Daerah • Dinas Kesehatan
26	Rate Nett Recent Migrasi	Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	• Pelayanan pindah datang penduduk (dalam dan luar daerah) • Pemutakhiran data migrasi penduduk berbasis NIK • Integrasi data migrasi dengan BPS dan OPD teknis	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	• Dinas Ketenagakerjaan • Dinas Sosial

			• Sosialisasi tertib administrasi kependudukan bagi pendatang		
--	--	--	---	--	--

5. Rencana Aksi Penataan Administrasi Data Kependudukan

No	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Instansi Utama	Instansi Pendukung
27	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	• Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Sekretariat Daerah • Dinas Kesehatan • Rumah Sakit/Klinik
28	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Cerai	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	• Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	• Pengadilan Agama • Kementerian Agama • Pangkep
29	Cakupan (Persentase)	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	• Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan	• Dinas Pemberdayaan

Kepemilikan Akta Nikah					dan Catatan Sipil	Masyarakat dan Desa
						• Sekretariat Daerah
						• Dinas Kesehatan
	Program Pencatatan Nikah	Pelayanan Nikah di KUA/Penghulu	• Pemeriksaan dokumen calon pengantin untuk pencatatan nikah • Pencatatan pernikahan di KUA • Penerbitan buku nikah / akta nikah	Kantor Kementerian Agama Kab. Pangkep		
		Pelayanan Isbat Nikah	• Sosialisasi isbat nikah (bagi pasangan yang belum tercatat) • Pencatatan setelah isbat dan penerbitan buku nikah	Kantor Kementerian Agama Kab. Pangkep		
	Program Sosialisasi & Edukasi Pencatatan Nikah	Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (GAS Nikah)	• Kampanye publik kesadaran nikah tercatat di ruang public • Kolaborasi KUA dengan pemerintah desa / tokoh	Kantor Kementerian Agama Kab. Pangkep	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan dan

				masyarakat untuk mengidentifikasi pasangan yang belum tercatat		Perlindungan Anak
30	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kematian	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	• Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Sekretariat Daerah • Dinas Kesehatan • Rumah Sakit/Klinik

BAB IV PENUTUP

A. PEMANTAUAN

Pemantauan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan merupakan proses sistematis untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kependudukan berjalan sesuai dengan arah, sasaran, dan tahapan yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan secara berkala guna menilai kemajuan capaian kinerja serta mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan di lapangan.

Pemantauan difokuskan pada ketercapaian indikator pembangunan kependudukan yang meliputi aspek kuantitas penduduk, kualitas penduduk, pembangunan keluarga, persebaran dan mobilitas penduduk, serta integrasi data kependudukan. Hasil pemantauan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, perbaikan kebijakan, dan penyesuaian strategi agar tujuan pembangunan kependudukan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Pemantauan dilakukan dalam rangka mengidentifikasi serta mengantisipasi potensi permasalahan yang memerlukan tindak lanjut dari target yang telah ditetapkan. Pemantauan bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi kemajuan pelaksanaan program secara periodik.
- Mengukur kesesuaian antara rencana dan realisasi implementasi kebijakan kependudukan.
- Mendeteksi kendala dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan rencana aksi.
- Memberikan rekomendasi perbaikan untuk optimalisasi program kependudukan.

Pemantauan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksana GDPK/PJPK yang dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun dengan menyusun laporan berkala perkembangan pelaksanaan rencana aksi sebagai upaya pencapaian target-target pembangunan kependudukan. Proses pemantauan dapat dilakukan dengan:

- Pengumpulan Data: Menggunakan laporan dari instansi terkait, observasi langsung, serta survei kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
- Analisis Data: Membandingkan data realisasi dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam peta jalan.

B. EVALUASI

Evaluasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kependudukan. Evaluasi bertujuan untuk menilai pencapaian sasaran, efektivitas strategi, rencana aksi serta dampak pembangunan kependudukan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan data capaian indikator pembangunan kependudukan, serta mempertimbangkan

dinamika dan tantangan yang berkembang di tingkat desa/kelurahan. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam perbaikan perencanaan, penguatan kebijakan, dan penyempurnaan pelaksanaan Peta Jalan pada periode selanjutnya. Evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Pelaksana GDPK/PJPK minimal 1 kali dalam setahun dengan menjelaskan capaian dari setiap indikator.

Hasil evaluasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan perbaikan strategi pelaksanaan pada periode selanjutnya. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pembangunan kependudukan, sekaligus memperkuat sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran untuk mewujudkan pembangunan kependudukan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

C. PELAPORAN

Pelaporan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas pelaksanaan pembangunan kependudukan. Pelaporan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kependudukan, serta sebagai sarana penyampaian informasi capaian kinerja kepada para pemangku kepentingan terkait.

Pelaporan disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi capaian indikator pembangunan kependudukan, termasuk perkembangan pelaksanaan program lintas sektor. Laporan memuat informasi mengenai capaian sasaran, kendala yang dihadapi, serta upaya tindak lanjut yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan Peta Jalan. Penyusunan laporan dilakukan dengan memanfaatkan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten disusun secara periodik sesuai dengan tahapan pelaksanaan dan digunakan sebagai bahan koordinasi, pengambilan kebijakan, serta penyempurnaan perencanaan pembangunan kependudukan pada periode berikutnya. Melalui sistem pelaporan yang terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan pelaksanaan pembangunan kependudukan dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan kependudukan nasional, provinsi dan kabupaten.

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU